

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (IKJIP)
2023 BADAN
PENDAPATAN**

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Daftar Isi
Kata Pengantar
IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I Pendahuluan

- 1.1** Dasar Pembentukan, Struktur dan Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa
- 1.2** Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana PD
- 1.3** Tujuan Penyusunan LKjIP-PD
- 1.4** Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian LKjIP-PD
- 1.5** Permasalahan Utama (*strategic issued*) PD

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1** Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa
- 2.2** Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa
- 2.3** Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

- a. Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja
- b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023
- c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya
- d. Membandingkan realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target Akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
- e. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar provinsi dan Nasional (jika ada)
- f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- h. Analisis program/kegiatan/Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan kinerja ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan dari beberapa bidang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023 berisi tentang informasi mengenai aktifitas dan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023, diharapkan akan dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah dalam periode tahun 2021-2026. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar, 16 Pebruari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Sumbawa



AQUS MUASTAMIN, S.SOS, M.Si
NIP. 19700828 199211 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Seluruh program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi sudah dituangkan dalam penetapan tujuan dan sasaran. Pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian strategis Tahun Anggaran 2023 program dan kegiatan yang telah dilaksanakan disusun dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah tahun 2023.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan realisasi dari seluruh program yang merupakan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 yang dapat dilihat dan diukur dengan capaian dan manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah merupakan arah dan tolak ukur pembangunan dibidang pendapatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Pada tahun anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan 2 program , 8 kegiatan dan 43 sub kegiatan gunamewujudkan 2 (dua) sasaran utama.

Dua sasaran utama Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan rencana kegiatan dan program tahun 2023 yang tertuang dalam realisasi kegiatan Badan Pendapatan Daerah secara umum tercapai sesuai dengan perencanaan dan pada tahap selanjutnya ada beberapa kegiatan yang membutuhkan tahapan tindak lanjut yang masih harus direalisasikan secara optimal, Kategori pencapaian Kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

Pencapaian Target	91% - 100%	37 sub kegiatan
Pencapaian Target	81% - 90%	3 sub kegiatan
Pencapaian Target	71% - 80%	3 sub kegiatan
Pencapaian Target	61% - 70%	1 sub kegiatan
Pencapaian Target	51% – 60 %	1 sub kegiatan

Dalam menghitung capaian kinerja yang telah dilakukan atas dasar indicator kinerja utama dan indicator kinerja penunjang yang ada, di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa memiliki capaian kinerja atas capaian kinerja Utama yaitu PAD dengan Capaian Kinerja sebesar 63,86%. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif sebagai upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Badan Pendapatan Ddaerah khususnya dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa umumnya. Yang selanjutnya mampu mendukung cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di semua ini.

BAB I

PENDAHULUAN

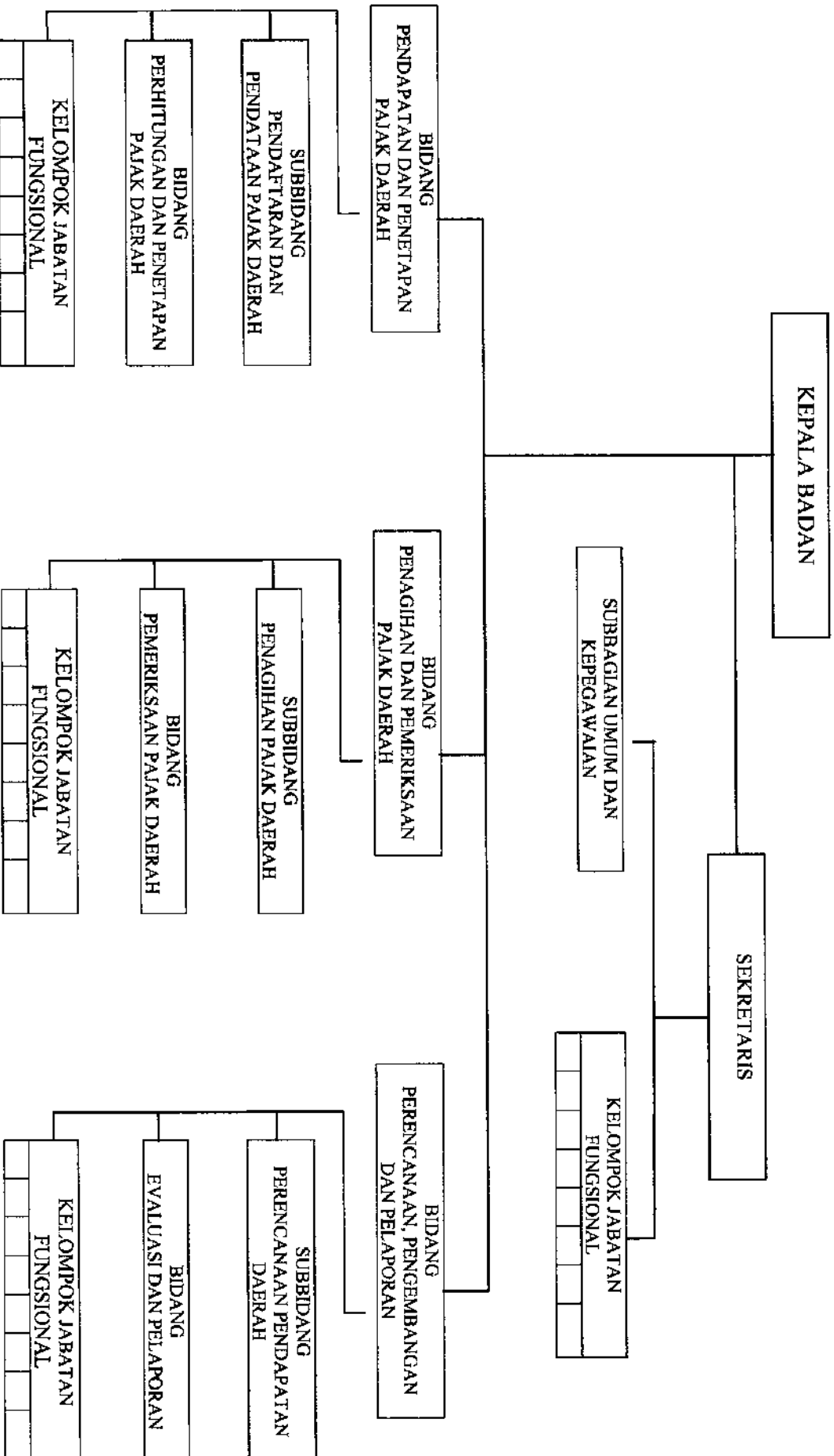
1.1 Dasar Pembentukan, Struktur dan Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

LKJIP (laporan Kinerja Instansi Pemerintah) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja dimaksud adalah Pengukuran Kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atau kinerja yang telah dan harusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dengan menyajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selain itu juga sebagai perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola anggaran dan sumber daya pada tahun anggaran 2023 perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk laporan kinerja sebagai hasil jerih payah dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk mewujudkan *good governance* di Kabupaten Sumbawa sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:



1.1.1.1.Tugas dan Fungsi

:

No	Jabatan	Rincian Tugas dan Fungsi
1	Kepala Badan	a. menyusun perencanaan di bidang pendapatan; b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan pendapatan daerah; c. mengkoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah; d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan Daerah; e. melaksanakan kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pajak Daerah, retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; f. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan; g. melaksanakan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi permohonan, pendaftaran, pembetulan, penundaan pembayaran/ angsuran keberatan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, kelebihan pembayaran, penghapusan ketetapan dan sengketa pajak Daerah dan retribusi Daerah; h. melaksanakan penatausahaan pendapatan yang meliputi kegiatan penghimpunan, penyusunan, pengolahan dan penyampaian laporan data subjek dan objek pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya; i. melaksanakan kegiatan pembukuan, evaluasi dan pelaporan atas penerimaan dan piutang pajak Daerah, retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah; j. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, klarifikasi dan rekonsiliasi data pendapatan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Instansi Lain yang terkait dalam perencanaan penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak Daerah, retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah; k. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan pemeriksaan kepatuhan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi Daerah;

		l. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendapatan pajak Daerah lainnya, serta pengendalian, pengembangan dan pelaporan; m. melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan Daerah; n. melaksanakan administrasi/penatausahaan dan pembinaan aparat sipil negara lingkup Badan; o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan Daerah; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris Badan	a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; b. mengkoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; c. menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis badan; e. mengumpulkan bahan bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan badan; f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja; g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan;

		i. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; j. Melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara; k. Melaksanakan penyediaan bahan pelaksanaan verifikasi; l. Melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan; m. Melaksanakan pengelolaan dan penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan; n. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan sistem informasi perpajakan daerah; b. memimpin pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan sistem informasi perpajakan daerah; c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan sistem informasi perpajakan daerah; d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis teknologi informasi pajak daerah; e. melakukan cetak massal surat pemberitahuan pajak terhutang, surat setoran pajak daerah, dan daftar himpunan ketetapan pajak daerah pajak

		bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; f. melakukan pendistribusian surat pemberitahuan pajak terutang, surat setoran pajak daerah, dan daftar himpunan ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; g. melakukan pemantauan pendistribusian surat pemberitahuan pajak terutang, surat setoran pajak daerah, daftar himpunan ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan benda berharga; h. mengajukan bahan usulan perubahan sistem informasi geografs, zona nilai tanah, nilai indek rata-rata, daftar biaya komponen bangunan, peta desa dan nilai jual obyek pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; i. menyediakan dan memperbarui sistem informasi perpajakan daerah berbasis teknologi; j. melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data subjek dan obyek pajak daerah; k. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah; l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, sistem informasi perpajakan daerah dan teknologi informasi pajak daerah; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4	Bidang Penagihan dan pemeriksaan pajak daerah	a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak; b. memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak; c. memimpin pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib

		d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak; e. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis bidang pembinaan wajib pajak; f. melakukan pembinaan wajib pajak; g. melakukan pengawasan pengelolaan pajak daerah; h. melaksanakan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan wajib pajak; i. memberikan penghargaan dan sanksi bagi wajib pajak; j. memberikan pelayanan dan konsultasi pajak daerah; k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; b. memverifikasi dan mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; f. menyiapkan dan merancang sistem

		informasi pendapatan daerah; g. melaksanakan koordinasi pengelolaan retribusi daerah; h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah; i. membuat konsep bahan kebijakan teknis retribusi, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; j. menyusun target pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan; k. melaksanakan rekonsiliasi dana perimbangan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; l. membuat laporan realisasi dan daftar tunggakan Retribusi; m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. melaksanakan urusan keprotokolian, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat badan dan pendokumentasian kegiatan Badan; c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan; d. melaksanakan urusan rumah tangga, keteriban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja; e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan badan, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan; g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan,	

		pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran; i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Badan; j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan; k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urutan kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepenimpinan teknis dan fungsional; m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.
	Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	a. menyusun rencana kerja Subbidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah; b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi,

		mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis perhitungan dan penetapan pajak daerah; c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan subbidang perhitungan dan penetapan pajak daerah; d. meneliti dan memproses Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah; e. melaksanakan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) f. melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah; g. menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah; h. melakukan verifikasi dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	Kepala Subbidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	a. menyusun rencana kerja Subbidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah; b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis perhitungan dan penetapan pajak daerah; c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan subbidang perhitungan dan penetapan pajak daerah; d. meneliti dan memproses Surat

		Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah; e. melaksanakan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) f. melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah; g. menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah; h. melakukan verifikasi dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah		a. menyusun rencana kerja Subbidang Penagihan Pajak Daerah; b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan menganalisis bahan kebijakan teknis kegiatan penagihan pajak daerah; c. melaksanakan koordinasi kegiatan penagihan pajak daerah; d. melaksanakan penagihan pajak daerah; e. melaksanakan penagihan piutang pajak daerah; f. melaksanakan perhitungan terhadap besarnya denda administrasi pajak daerah; g. melaksanakan penatausahaan piutang pajak daerah; h. memfasilitasi permohonan angsuran pajak daerah; i. melakukan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah;

		j. menerbitkan dan menyampaikan surat teguran/peringatan kepada wajib pajak; k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penagihan Pajak Daerah; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Kepala Subbidang Pemeriksaan Pajak Daerah		a. menyusun rencana kerja Subbidang Pemeriksaan Pajak Daerah; b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis kegiatan pemeriksaan pajak daerah; c. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan keberatan, pembetulan dan sengketa pajak daerah; d. melakukan pengkajian dan verifikasi terhadap permohonan keberatan, pembetulan dan sengketa pajak daerah; e. melakukan verifikasi lapangan atas permohonan keberatan, pembetulan dan sengketa pajak daerah; f. memfasilitasi penyelesaian keberatan dan sengketa atas ketetapan pajak daerah; g. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak; h. melaksanakan pemeriksaan atas rekomendasi dari subbidang terkait; i. menerbitkan hasil pemeriksaan pajak daerah; j. menerbitkan surat keputusan keberatan dan pembetulan atas surat ketetapan pajak daerah; k. melaksanakan pemantauan,

		evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemeriksaan Pajak Daerah; dan 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah	a. menyusun rencana kerja Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah; b. menyusun, merancang, mengembangkan, mengkaji ulang, dan menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah; c. melaksanakan perencanaan pengelolaan pendapatan daerah; d. menyusun target rencana penerimaan pendapatan daerah; e. menyusun Standar Operasional Prosedur pendapatan daerah; f. menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pendapatan daerah; g. melakukan evaluasi penerapan Standar Operasional Prosedur pendapatan daerah; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan	a. menyusun rencana kerja Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis akuntansi, pembukaan dan pelaporan pendapatan daerah; c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;

		d. menyusun laporan penerimaan kas daerah dan arus kas masuk secara periodik berupa laporan per semester dan laporan akhir tahun; e. melakukan penyusunan dan pelaporan pendapatan daerah; f. merumuskan prosedur pembukaan dan pelaporan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya; g. melakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pendapatan daerah; h. menyusun laporan realisasi pendapatan daerah secara berkala; i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
	Kelompok Jabatan Fungsional	a. Fungsional Perencana Ahli Muda b. Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda. c. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda.

1.2 Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana PD

Berdasarkan data kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, sampai dengan Tahun 2023, berikut disajikan kondisi dan status kepegawaian pada tiap Bidang yang merupakan komponen utama pada aspek Sumber Daya Manusia di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yaitu:

Tabel 1.1

Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian;

NO.	Bagian	Jumlah PNS(Orang)	Jumlah P3K/kontrak (orang)	Jumlah Total (orang)
1	2	3		
1	Sekretariat	15	5	20
2	Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	15	4	19
3	Bidang Penagihan dan pemeriksaan pajak daerah	14	4	18
4	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Relaporan Pendapatan Daerah	7	3	10
Jumlah		51	16	67

Tabel 1.2.

Data SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Jabatan/Bagian	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah total
1	Sekretariat	-	2	12	2	4			20
2	Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	-	-	16	1	2			19
3	Bidang Penagihan dan pemeriksaan pajak daerah	-	1	9	4	4			18
4	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatar Daerah		-	8		2			10
J U M L A H			3	45	7	12			67

Tabel 1.3

Data SDM berdasarkan Batas Usia Pensiun

NO	Bagian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	>2026
1.	Sekretariat		-	1				
2	Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah				1		1	
3	Bidang Penagihan dan pemeriksaan pajak daerah			2		2	1	
4	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah							
J U M L A H			1	3		2	1	

Untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honoror Daerah yang tersedia masih kurang, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun dari segi kemampuan (kualitas). Hal ini disebabkan oleh kewenangan yang begitu luas, berat dan menantang. Untuk itu perlu dilakukan penambahan jumlah personil dan pengembangan dari segi kemampuan personil.

Aset, Sarana dan Prasarana

Urusan dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah dari tahun ke tahun terus meningkat baik penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sejalan dengan meningkatnya urusan tersebut, terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis barang yang dikelola.

Kesungguhan dalam pengelolaan dan Keakuratan penyajian data dan informasi barang milik negara, secara holistik dijalankan oleh seluruh SKPD Kabupaten merupakan jaminan bagi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan BPKP dengan perdikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Guna mendukung pelaksanaan Program Kerja dan operasionalisasi organisasi, Bapenda Kabupaten Sumbawa berupaya memenuhi fasilitas kerja berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, sumberdaya aparatur yang bersih dan profesional, serta sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran Desentralisasi (APBD). Sampai Tahun 2023 Bapenda Kabupaten Sumbawa memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :



DAFTAR INVENTARIS BARANG

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	MerK/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Keterangan
1	02.02.01.01.003	Station Wagon	Isuzu Panther / TBR 541	2014	Hibah	Mutasi Dari Sepeda yg Dipinjam Pakel PBB
2	02.02.01.01.003	Station Wagon	Toyota / Kijang Innova 2.0 G A/T	2017	Pembelian	Station Wagon 2
3	02.02.01.01.003	Station Wagon	ISUZU / PANTHER	2004	Hibah	kendaraan roda empat
4	02.02.01.01.003	Station Wagon	Grand Max / MB 1.3 D FF FH EA VIN 2019	2019	Pembelian	Program Pinjam oleh SAMSAT Sumbawa
5	02.02.01.02.003	Miri Bus (Penumpang 14 Orang Kedawaah)	ISUZU / TBR 54P TURBO	2009	Pembelian	Dropping dari DPRK
6	02.02.01.02.003	Miri Bus (Penumpang 14 Orang Kedawaah)	Daihatsu / Terios	2013	Pembelian	Mutasi dari DPRK ke Bag. Asat
7	02.02.01.02.003	Miri Bus (Penumpang 14 Orang Kedawaah)	Isuzu Panther / miri bus	2003	Pembelian	mutasi dari Serida
8	02.02.01.03.002	Pick Up	Hyundai / -	2012	Pembelian	Pick Up Double Cabin (EA 9107 AA)
9	02.02.01.03.003	Yenggler/Traiter	Kawasaki / KLX150BF AMA	2017	Pembelian	Kendaraan dinas roda dua Type Trail 2
10	02.02.01.03.003	Yenggler/Traiter	Kawasaki / KLX150BF AMA	2017	Pembelian	Kendaraan dinas roda dua Type Trail 2
11	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	2012	Pembelian	sepeda motor (Dropping Asat EA 4198 AA)
12	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	HONDA WIN / MCB	2001	Pembelian	sepeda motor
13	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	HONDA WIN / -	2004	Hibah	sepeda motor
14	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	HONDA WIN / -	2004	Hibah	sepeda motor
15	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	HONDA WIN / -	2004	Hibah	sepeda motor
16	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	HONDA WIN / -	2004	Hibah	sepeda motor
17	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda / Mega pro 160	2010	Pembelian	sepeda motor DPRK kab stiw
18	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	2012	Pembelian	sepeda motor (dropping Asat EA 4213 AA)
19	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	Supra X 125 / -	2012	Pembelian	sepeda motor (dropping Asat EA 4184 AA)
20	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	Supra X 125 / -	2012	Pembelian	sepeda motor (Dropping Asat EA 4154)
21	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda / -	2012	Pembelian	sepeda motor Sport Megapro (dropping Asat EA 4151 AA)
22	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	HONDA WIN / -	2004	Hibah	sepeda motor
23	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150 BF	2016	Pembelian	Trail
24	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	Supra X 125 / -	2012	Pembelian	Sepeda motor (dropping Asat EA 4204 AA)
25	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2016	Pembelian	Mutasi dari SETDA Kab Sumbawa
26	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2016	Pembelian	Mutasi dari SETDA Kab Sumbawa
27	02.03.03.01.072	Global Positioning System	Trimble Juno 5B / -	2012	Pembelian	GPS
28	02.03.03.09.018	alat ukur lain-lain lainnya (usa)	jason still / -	2012	Pembelian	Rot motor
29	02.03.03.09.018	alat ukur lain-lain lainnya (usa)	Leica Disto X310	2015	Pembelian	Dikawatir
30	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	olympic / -	2009	Pembelian	lemari
31	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	prince / -	2010	Pembelian	almari
32	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	olympic / -	2012	Pembelian	Lemari dua pintu

33	02.05.01.02.001	Mesin Hitung Manual	- / -	2006	Pembelian	kalulator
34	02.05.01.02.001	Mesin Hitung Manual	citizen / -	2009	Pembelian	mesin hitung
35	02.05.01.02.001	Mesin Hitung Manual	casio / -	2011	Pembelian	mesin hitung
36	02.05.01.02.001	Mesin Hitung Manual	Casio / -	2012	Pembelian	mesin hitung
37	02.05.01.02.002	Mesin Hitung Listrik	iware	2022	Pembelian	
38	02.05.01.02.012	Mesin Penghitung Uang	Dinamik	2016	Pembelian	
39	02.05.01.04.003	Rak Besi	Abba Rack Server 19" * / -	2013	Pembelian	Abba Rack Server 19" Closed 30U-900mm
40	02.05.01.04.003	Rak Besi	- / -	2014	Pembelian	Pengadaan Rak Arsip Besi
41	02.05.01.04.003	Rak Besi	-	2014	Pembelian	Bedanya model Pengadaan Rak Arsip
42	02.05.01.04.003	Rak Besi	-	2021	Pembelian	Rak Besi Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
43	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	-	2017	Pembelian	
44	02.05.01.04.007	Brankas	- / -	2006	Pembelian	bran kas
45	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	-	2017	Pembelian	
46	02.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Beng MX 760 / -	2012	Pembelian	LCD Proyektor
47	02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	-	2017	Pembelian	
48	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	-	2017	Pembelian	
49	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	-	2017	Pembelian	Papan Struktur Organisasi
50	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	-	2017	Pembelian	Papan Data Pegawai
51	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	-	2017	Pembelian	Back Drop / Papan Informasi Visi Misi
52	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	- / -	2010	Pembelian	papan informasi
53	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	- / -	2011	Pembelian	papan himbauan pelunasan pajak
54	02.05.02.01.008	Meja Rapat	Jat/Triplek	2016	Pembelian	Meja Rapat/Sidang
55	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	- / -	1994	Pembelian	meja biro
56	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	- / -	2002	Pembelian	meja biro
57	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	- / -	2013	Pembelian	Meja Biro Sedang
58	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	-	2017	Pembelian	
59	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	- / -	2007	Pembelian	Kursi lipat
60	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	Masterindo	2021	Pembelian	Kursi Lipat Sekretaris Bapenda
61	02.05.02.01.039	Meja Komputer	aztek / -	2008	Pembelian	meja komputer
62	02.05.02.01.039	Meja Komputer	AzteK / -	2012	Pembelian	meja komputer
63	02.05.02.04.003	A.C. Window	-	2017	Pembelian	
64	02.05.02.04.003	A.C. Window	-	2017	Pembelian	
65	02.05.02.04.004	A.C. Split	POLYTRON PAC-09VX- M	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
66	02.05.02.04.006	Kipas Angin	Regency	2012	Pembelian	
67	02.05.02.04.006	Kipas Angin	Sekai	2013	Pembelian	Showroom
68	02.05.02.04.015	Alat Pendingin lainnya	Kulkas / Lemari Pendingin	2017	Pembelian	Kulkas / Lemari Pendingin
69	02.05.02.06.002	Televisi	-	2017	Pembelian	
70	02.05.02.06.002	Televisi	-	2017	Pembelian	
71	02.05.02.06.008	Sound System	Bohringer / B 2150"	2014	Pembelian	Pengadaan Monitor Aktif Speaker 15" Kegiatan Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor
72	02.05.02.06.008	Sound System	Rich / 116"	2014	Pembelian	Pengadaan Sub Woofer Aktif Speaker Kegiatan Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor
73	02.05.02.07.016	Alat Pembantu Kebersihan	-	2017	Pembelian	

74	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	2017	Pembelian	
75	02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2017	Pembelian	
76	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2017	Pembelian	
77	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2017	Pembelian	meja 1/2 biro
78	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-/-	1990	Pembelian	
79	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-/-	1982	Pembelian	Meja kerja 1/2 biro
80	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-/-	1994	Pembelian	meja kerja 1/2 biro
81	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-/-	1990	Pembelian	meja kerja 1/2 biro
82	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-/-	1991	Pembelian	meja kerja 1/2 biro
83	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-/-	1994	Pembelian	meja kerja 1/2 biro
84	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-/-	2002	Pembelian	meja 1/2 biro
85	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	2017	Pembelian	
86	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	usinto / -	2011	Pembelian	kursi kerja pejabat eselon II
87	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2017	Pembelian	
88	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-/-	2002	Pembelian	Kursi eselon III
89	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2015	Pembelian	
90	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2017	Pembelian	
91	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	- / M1 01 CATL	2016	Pembelian	dpkk kab sumbawa
92	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Polaris / -	2013	Pembelian	Kursi Tanpa Tangan
93	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2017	Pembelian	
94	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2017	Pembelian	
95	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lemari Arsip 2 Pintu	2017	Pembelian	
96	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2015	Pembelian	
97	02.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	-/-	2012	Pembelian	Mic wireless (keleengkapan Alat Musik)
98	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2017	Pembelian	
99	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2017	Pembelian	
100	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2017	Pembelian	
101	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2017	Pembelian	
102	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	pro link / -	2008	Pembelian	ups/stabilizer
103	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink / -	2012	Pembelian	ups
104	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Ica 1082 / -	2012	Pembelian	UPS
105	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA CT 682 / -	2013	Pembelian	UPC CT 682
106	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA CT 1082	2014	Pembelian	Pengadaan UPS Kegiatan Penitungen, Penerbitan dan Penyampaian Pajak Daerah
107	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA CT 10028	2014	Pembelian	Pengadaan UPS kegiatan Penagihan PAD
108	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA RN 12000	2014	Pembelian	Pengadaan UPS Kegiatan Koordinasi Penyelasan Dana Perimbangan
109	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / Ce 1200	2015	Pembelian	
110	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	2015	Pembelian	
111	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	2015	Pembelian	
112	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / S/N: 2755D/ QCM5 JR wva 40	2015	Pembelian	
113	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / CT 1082 B	2016	Pembelian	
114	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / CT 10828	2016	Pembelian	
115	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / FR 2000	2016	Pembelian	
116	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Libeard PS2200R03-	2013	Pembelian	Libeard PS2200R03-230 UPS

117	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	2017	Pembelian	
118	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC Back-UPS / BX1600RM1-MS (1600VA 230V, AVR, Universal Sockets	2022	Pembelian	Reklas dari belanja barang dan jasa
119	02.06.01.01.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	- / -	2012	Pembelian	tiang mic
120	02.06.01.01.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	- / -	2012	Pembelian	Stand box
121	02.06.01.01.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	- / -	2012	Pembelian	kabel
122	02.06.01.01.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	- / -	2012	Pembelian	Behringer
123	02.06.01.01.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	- / -	2012	Pembelian	mixer (kelengkapan alat musik)
124	02.06.01.02.061	Lensa Kamera	Kodak / -	2011	Pembelian	kamera digital
125	02.06.01.02.061	Lensa Kamera	Canon EOS 5G Max 2 /	2012	Pembelian	kamera DSLR
126	02.06.01.02.061	Lensa Kamera	EOS 700D	2014	Pembelian	Pengadaan Kamera Penyusunan ASP
127	02.06.01.02.133	LCD Monitor	TCL S50A8	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
128	02.06.01.04.005	Mesin Cetak Elektronik	- / -	2007	Pembelian	mesin perborsi
129	02.06.01.04.005	Mesin Cetak Elektronik	- / -	2007	Pembelian	mesin porporasi
130	02.06.01.04.005	Mesin Cetak Elektronik	Hametzu / -	2011	Pembelian	mesin air porporasi
131	02.06.01.04.005	Mesin Cetak Elektronik	-	2016	Pembelian	Mesin Porporasi (Huruf Angka, Huruf) + Honor PPK, Pengadaan Barang & Jasa dan PPHP
132	02.06.01.04.005	Mesin Cetak Elektronik	-	2016	Pembelian	Mesin Porporasi (Huruf, Angka)
133	02.08.01.19.062	Tablet Machine	Apple	2018	Pembelian	Kepala Badan
134	02.08.01.41.004	Alat Dyeing Jeruk Kap 100 Kg	-	2018	Pembelian	Tabung pemadam
135	02.08.01.41.249	Stabilizer/UPS	APC BX1400U-MS	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
136	02.08.03.04.066	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	Toshiba / L 645	2014	Pembelian	Pengadaan Baterai Lap Top Kegiatan BPH-TTB
137	02.08.03.09.001	Sekop	-	2011	Pembelian	
138	02.08.04.02.039	Serial Scanner/Printer	DS 770 A4 SHEET-FED, ONE PASS DUPLEX COLOUR SNAWNE	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
139	02.08.04.05.002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	ICA UPS 602B	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
140	02.10.01.02.001	P.C Unit	-	2017	Pembelian	
141	02.10.01.02.001	P.C Unit	-	2017	Pembelian	
142	02.10.01.02.001	P.C Unit	-	2017	Pembelian	
143	02.10.01.02.001	P.C Unit	-	2017	Pembelian	
144	02.10.01.02.001	P.C Unit	- / -	2006	Pembelian	Rusak berat komputer (rusak)
145	02.10.01.02.001	P.C Unit	Vision / -	2009	Pembelian	komputer PC
146	02.10.01.02.001	P.C Unit	samsung / -	2009	Pembelian	komputer PC
147	02.10.01.02.001	P.C Unit	LG / -	2011	Pembelian	komputer pc
148	02.10.01.02.001	P.C Unit	Acer / -	2011	Pembelian	komputer PC
149	02.10.01.02.001	P.C Unit	LG / -	2011	Pembelian	komputer PC
150	02.10.01.02.001	P.C Unit	- / -	2012	Pembelian	komputer PC
151	02.10.01.02.001	P.C Unit	HP omny 120-15,13/2100 / -	2012	Pembelian	komputer pc
152	02.10.01.02.001	P.C Unit	Dell inspiration one 2330 / -	2012	Pembelian	komputer pc
153	02.10.01.02.001	P.C Unit	Lenovo	2015	Pembelian	
154	02.10.01.02.001	P.C Unit	Lenovo	2015	Pembelian	
155	02.10.01.02.001	P.C Unit	All in One	2015	Pembelian	
156	02.10.01.02.001	P.C Unit	All in One	2015	Pembelian	

157	02.10.01.02.001	P.C Unit	Lenovo / AIO 300-201SH	2016	Pembelian	dpkk kab sumbawa
158	02.10.01.02.001	P.C Unit	Dell / Processor Intel Core i5-6200U	2016	Pembelian	
159	02.10.01.02.001	P.C Unit	-	2017	Pembelian	
160	02.10.01.02.001	P.C Unit	Lenovo	2018	Pembelian	
161	02.10.01.02.001	P.C Unit	LENOVO ALL-IN-ONE IDEA	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
162	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS PC ALL IN ONE	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
163	02.10.01.02.001	P.C Unit	Asus / M5401WU	2022	Pembelian	
164	02.10.01.02.001	P.C Unit	Lenovo Idea Centre / AIO 3 24ALC6	2022	Pembelian	harga + 1/2 Honorarium Pejabat pengadaan (kelas dari belanja barang dan jasa)
165	02.10.01.02.002	Lap Top	-	2017	Pembelian	
166	02.10.01.02.002	Lap Top	Asus / VIVOBOOK A412FL	2019	Pembelian	Laptop Bidang Pasar
167	02.10.01.02.002	Lap Top	Asus / VIVOBOOK A412FL	2019	Pembelian	Laptop SIMDA Bidang Pengendalian dan Pengembangan
168	02.10.01.02.002	Lap Top	Asus	2020	Pembelian	Badan Pendapatan daerah
169	02.10.01.02.002	Lap Top	ASUS NOTEBOOK A412FL	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
170	02.10.01.02.002	Lap Top	HP	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
171	02.10.01.02.002	Lap Top	ASUS	2020	Pembelian	badan pendapatan daerah
172	02.10.01.02.002	Lap Top	Acer / Spin Active (13.3")	2021	Pembelian	Laptop Bidang Pendapatan dan Penetapan Pajak Daerah
173	02.10.01.02.002	Lap Top	Asus / Zenbook Flip 13 (UX361EA)	2022	Pembelian	harga + Honorarium PPK (Reklas dari belanja barang jasa)
174	02.10.01.02.003	Note Book	-	2017	Pembelian	
175	02.10.01.02.003	Note Book	-	2017	Pembelian	
176	02.10.01.02.003	Note Book	-	2017	Pembelian	
177	02.10.01.02.003	Note Book	Toshiba / -	2009	Pembelian	komputer note book
178	02.10.01.02.003	Note Book	Acer / -	2009	Pembelian	komputer note book
179	02.10.01.02.003	Note Book	Sony Vaio / -	2011	Pembelian	komputer note book
180	02.10.01.02.003	Note Book	Toshiba / -	2011	Pembelian	komputer note book
181	02.10.01.02.003	Note Book	Sony vaio / -	2011	Pembelian	komputer note book
182	02.10.01.02.003	Note Book	Samsung Aktiv Book	2014	Pembelian	Pengadaan Notebook Kegiatan Penyusunan Rencana Daerah
183	02.10.01.02.003	Note Book	Asus / Transformer Book Flip TP 300LD-DW1020	2015	Pembelian	
184	02.10.01.02.003	Note Book	Z40-70823	2015	Pembelian	
185	02.10.01.02.003	Note Book	Lenovo / G40-80 core i7	2016	Pembelian	dpkk kab sumbawa
186	02.10.01.02.003	Note Book	Platform	2016	Pembelian	dpkk kab sumbawa
187	02.10.01.02.003	Note Book	Lenovo / V50-70 7993	2016	Pembelian	
188	02.10.01.02.009	Tablet PC	Lenovo	2021	Pembelian	IPAD Sekretariat Bapenda
189	02.10.02.01.010	Line Printer	Printtronk / -	2013	Pembelian	Line Matrix Printer Printtronk
190	02.10.02.01.012	Hard Disk	-	2013	Pembelian	Hardisk External
191	02.10.02.01.012	Hard Disk	-	2017	Pembelian	
192	02.10.02.01.012	Hard Disk	Seagate / -	2011	Pembelian	hardisk external

193	02.10.02.01.012	Hard Disk	seagate / -	2012	Pembelian	hardisk saja + external case
194	02.10.02.01.012	Hard Disk	Seagate / -	2012	Pembelian	Hardisk Eksternal
195	02.10.02.01.012	Hard Disk	Toshiba / -	2012	Pembelian	Hardisk Eksternal
196	02.10.02.01.012	Hard Disk	WD	2016	Pembelian	
197	02.10.02.01.012	Hard Disk	-	2017	Pembelian	
198	02.10.02.01.012	Hard Disk	Asus	2020	Pembelian	Badan Pendapatan Daerah
199	02.10.02.01.012	Hard Disk	Seagate experton (7TB)	2022	Pembelian	
200	02.10.02.02.008	Plotter (Peralatan Mini Komputer)	HP Designjet 520 / -	2013	Pembelian	Plotter HP Designjet
201	02.10.02.02.016	Speaker Komputer	- / -	2008	Pembelian	speaker
202	02.10.02.02.016	Speaker Komputer	Vanda / -	2012	Pembelian	Speaker Aktive
203	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	dot matrix / -	2009	Pembelian	printer
204	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	- / -	2017	Pembelian	
205	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	canon pixma mp 145 / -	2009	Pembelian	printer
206	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Dotmatrix	2017	Pembelian	
207	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L 100 Inkjet / -	2011	Pembelian	printer
208	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2017	Pembelian	
209	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / -	2011	Pembelian	printer
210	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2017	Pembelian	
211	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	canon pixma / -	2011	Pembelian	printer
212	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2017	Pembelian	
213	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon inkjet ip 2770 / -	2011	Pembelian	printer
214	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Dotmatrix	2017	Pembelian	
215	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L 200 / -	2011	Pembelian	printer
216	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma MP 287 / -	2012	Pembelian	printer
217	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2017	Pembelian	
218	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	2012	Pembelian	printer
219	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2017	Pembelian	
220	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma MP 287 / -	2012	Pembelian	printer
221	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon MP 287 / -	2012	Pembelian	printer
222	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2017	Pembelian	
223	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / -	2012	Pembelian	printer
224	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2017	Pembelian	
225	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon ip 2770 / -	2012	Pembelian	printer
226	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 360	2015	Pembelian	
227	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LQ 2190 / -	2012	Pembelian	printer
228	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	LQ 2190 / -	2013	Pembelian	Printer
229	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 220 All In One	2015	Pembelian	
230	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma IP 2770 / -	2013	Pembelian	Printer
231	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / MP 287	2015	Pembelian	
232	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fuji xerox docuprint 3055 / -	2013	Pembelian	Printer Laserjet Fuji xerox docuprint 3055
233	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L 210	2014	Pembelian	Pengadaan Printer Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi penerimaan PAID
234	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	LQ 2190	2014	Pembelian	Pengadaan Printer Kegiatan Cetak MASA SPPT,SSPD,SSPD-S,DMKP
235	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Deskjet Ink	2016	Pembelian	
236	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L220	2016	Pembelian	dpk kab sumbawa

237	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L365	2016	Pembelian	
238	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2016	Pembelian	Printer Epson
239	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / LaserJet	2016	Pembelian	
240	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L320	2016	Pembelian	
241	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L365	2018	Pembelian	
242	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printorex / P7215	2018	Pembelian	
243	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson LQ2190	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
244	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L3110	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
245	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L3110	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
246	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L4150	2020	Pembelian	BALANG PENDAPATAN DAERAH
247	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L4150	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
248	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L5190 All In One Wi-Fi ADF	2021	Pembelian	Printer Sekretariat Bupati
249	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LQ310	2021	Pembelian	Printer Sekretariat Bupati
250	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / DCP-1420W	2021	Pembelian	Printer Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaksanaan Pendapatan Daerah Bupati
251	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LQ 2190	2022	Pembelian	
252	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Eco Tank / L3250 A4 (L3256)	2022	Pembelian	
253	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Conter Scanner HD 42 MF2300 / -	2013	Pembelian	Scanner AO Conter Scanner HD 42 MF2300
254	02.10.02.03.017	External Portable Hardisk	KAPASITAS 1 TBRA 8TB (TB)	2020	Pembelian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
255	02.10.02.04.001	Server	Dell Power Edge R620 ES-2640 / -	2013	Pembelian	Server database
256	02.10.02.04.001	Server	Dell Power Edge R620 ES-2640 / -	2013	Pembelian	Server Aplikasi Dual Rack
257	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	AMP / Isi 50	2013	Pembelian	Connector Armp Type Isi 50
258	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	Balden Cat 5e / -	2013	Pembelian	Kabel UPT Balden Cat 5e
259	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	Original Microsoft Windows server 08 / -	2013	Pembelian	Digital Microsoft Windows Server 2008 (25 Client)
260	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	Oracle 11g Standard Edition / -	2013	Pembelian	Oracle 11g Standard Edition (25 Client)
261	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	Map Info Professional / -	2013	Pembelian	MAO Info Professional Ver 11
262	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	D-Link Air Premier DAP-3250	2014	Pembelian	Pengadaan Premier Dual Band Access Point
263	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	Dell Power Connect 2816 / -	2013	Pembelian	SWIT Dell Power Connect 2816
264	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	-	2014	Pembelian	Pengadaan Hubswitch Kegiatan Cetak Mecal Sport, SSPD, SSPD-S, DHPK

no	jenis barang	Tahun pembelian	asal usul	Ket
1	3	4	5	6
A.	Laptop Acer Travel Mate	2023	Pembelian	
	Laptop Acer Travel Mate	2023	Pembelian	
	Laptop Acer Travel Mate	2023	Pembelian	
	Printer Dot Matrix Epson / LQ-2190	2023	Pembelian	
	Printer Epson All in One Epson L3210 (2 Buah)	2023	Pembelian	
	Printer Epson All in One Epson L3250	2023	Pembelian	
	Pompa Air Shimizu/PS-130 BIT	2023	Pembelian	

1.3 Tujuan Penyusunan LKjIP-PD

LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai suatu instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian LKjIP-PD

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Penyampaian Laporan Kinerja, LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 disusun dengan mekanisme atau tahapan, sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Selaku kepala perangkat daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa diamanatkan untuk menyusun dan menyampaikan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023. Maka sesuai dengan struktur, rincian tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa selanjutnya membentuk dan menetapkan Tim Penyusun yang terdiri dari unsur-unsur aparatur yang berkesuaian dengan tugas dan fungsinya serta aparatur lainnya di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kualifikasi personal.
2. Pengumpulan Data Kinerja Setelah tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbentuk, maka tim dimaksud selanjutnya

melakukan pengumpulan data kinerja dari penanggung jawab data/informasi pada setiap unit kerja. Data kinerja yang dikumpulkan tersebut dirangkum dari seluruh perangkat unit kerja mulai dari tingkat Sekretariat, Bidang, Seksi sampai dengan Subbagian. Pengumpulan data dari para penanggungjawab data/informasi dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja. Proses pengumpulan dan perangkuman oleh tim senantiasa memperhatikan beberapa hal penting, antara lain: indikator kinerja yang digunakan/dilaporkan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

3. Pengukuran Kinerja Tahap berikutnya setelah dilakukan pengumpulan dan perangkuman data kinerja, tim selanjutnya melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh tim adalah dengan membandingkan antara capaian yang direalisasikan dengan target kinerja yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dapat ditentukan secara berkala (triwulan) dan terakumulasi menjadi pengukuran tahunan. Pengukuran dan perbandingan dalam laporan kinerja tersebut dilakukan oleh tim untuk mendapatkan kecukupan informasi sehingga dapat menggambarkan posisi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023.

4. Penyusunan dan Penyampaian LKjIP Setelah tahap pengukuran kinerja selesai dilaksanakan, maka tim selanjutnya menyusun dan menyampaikan rancangan atau draft LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 kepada seluruh Kepala Bidang dan Kepala Subbidang selaku Pimpinan Unit Kerja, untuk diverifikasi kesesuaian data kinerja yang telah dikumpulkan, dirangkum dan diukur dengan dokumen perjanjian kinerja yang disepakati sebelumnya secara berjenjang. Setelah seluruh kepala bidang dan kepala subbidang menyetujui rancangan atau draft LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 tersebut maka diteruskan penyampaiannya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Pimpinan Lembaga (perangkat daerah).
5. Reviu atas LKjIP Setelah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa menerima hasil kerja Tim Penyusun, berupa draft LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 maka selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa selaku APIP untuk dilakukan reviu. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Reviu yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sumbawa terhadap LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi

dan penyajian laporan kinerja, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Tim Penyusun LKJIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 akan segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/ kesalahan tersebut. Tahapan revidi tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Revidi dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan LKJIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Revidi harus sudah selesai sebelum diandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

6. Penyampaian LKJIP Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Sumbawa, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah diterima dan disetujui oleh Bupati Sumbawa, maka selanjutnya dokumen LKJIP di unggah pada aplikasi eSAKIP REVUIU Kementerian PAN-RB

1.5 Permasalahan Utama (*strategic issue*) PD

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat disebutkan bahwa permasalahan perangkat daerah adalah kesenjangan antara kinerja perangkat daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan

kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi ril saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan perangkat daerah tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuan isu strategis bagi perangkat daerah. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di masa yang akan datang.

1.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan Pendapatan di daerah dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Badan Pendapatan Daerah serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

TABEL 1.5
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Potensi PAD Rendah	Terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah.	a. Adanya <i>closed list</i> (hanya dapat memungut jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU dimaksud). b. Terbatasnya pertumbuhan sektor yang menjadi domain PAD, c. Tingkat <i>tax buoyancy</i> (elastisitas penerimaan pajak terhadap laju PDB) rendah
2	Kepabuhan rendah	1. Layanan pajak kurang Optimal 2. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak rendah.	a. Belum baiknya system layanan b. Kinerja SDM rendah c. Kurang optimalnya system dan teknologi informasi. d. Database pajak tidak up to date. a. Efektivitas sosialisasi masih rendah. b. Belum efektifnya insentif dan sanksi bagi Wajib pajak /wajib retribusi.

Uraian masalah pokok pada Tabel di atas dalam RPJMD merupakan Perumusan Masalah pokok yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum.

Memperhatikan isi Tabel 1.5 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa permasalahan dalam Pelayanan

dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya:

No	Permasalahan pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
1	Adanya <i>closed list</i> (hanya dapat memungut jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU dimaksud).	Pembatasan jumlah pungutan pajak daerah dan retribusi daerah
2	Terbatasnya pertumbuhan sektor yang menjadi domain PAD,	Kurangnya koordinasi diintern satuan kerja maupun antar satuan kerja penghasil PAD
3	Tingkat <i>tax buoyancy</i> (elastisitas penerimaan pajak terhadap laju PDB) rendah	Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah,yang ditandai dengan salah satunya adalah ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi
4	Belum baiknya system layanan	Kurangnya pelayanan publik yang baik (<i>excellent service</i>), terpercaya dan transparan.
5	Kinerja SDM rendah	Kurangnya fungsi pengawasan melekat;
6	Kurang optimalnya system dan teknologi informasi.	Masih adanya beberapa kebutuhan data dan informasi yang belum terakomodasi ke dalam sistem (<i>software</i>), sehingga bisa menghambat proses pelaksanaan pengelolaan keuangan
7	Database pajak tidak up to date.	Alokasi anggaran pengembangan teknologi masih kurang
8	Efektivitas sosialisasi masih rendah.	Kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak dan retribusi pajak
9	Belum efektifnya insentif dan sanksi bagi Wajib pajak/wajib retribusi.	Belum adanya kebijakan khusus terkait pelaksanaan pemberian intensif dan sanksi bagi WP/WR.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang bidang keuangan sub urusan pendapatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa masih dihadapkan pada beberapa isu strategis dan permasalahan sebagai berikut.

Tabel 1.6

Isu-Isu Strategis dan Permasalahan Utama Bapenda Kab. Sumbawa

No	Isu – Isu Strategis	Permasalahan
1	2	3
1	Peningkatan kualitas layanan pajak	Sarana dan prasarana Badan Pendapatan Daerah belum memiliki sistem yang terintegrasi dan <i>on line</i> pada 24 kecamatan
2	Peningkatan kualitas SDM	Kinerja Sumber Daya Manusia rendah
3	Penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah daerah belum Optimal
4	Refocusing kebijakan daerah untuk mendukung sektor penyunbang PAD	- Terbatasnya pertumbuhan sektor yang menjadi domain PAD - adanya <i>closed list</i> (hanya dapat memungut jenis pajak yang tercantum yang tercantum dalam UU dimaksud)
5	Optimalisasi system dan teknologi informasi	Kurang optimalnya sistem dan teknologi informasi
6	Pembaharuan database pajak secara real time	Database pajak tidak up to date
7	Penguatan sosialisasi secara luas dan kreatif	Efektifitas sosialisasi masih rendah
8	Penerapan insentif dan sanksi	Belum efektifnya insentif dan sanksi bagi wajib pajak/wajib retribusi

Dari analisis perkembangan strategi diatas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan sebagai isu strategis yang akan disusun strategi pelaksanaannya. Faktor Kunci Keberhasilan tersebut adalah:

1. Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang syah tanpa membebani masyarakat;

2. Memberikan insentif (*rewards*) kepada pihak yang berkinerja baik dalam hal peningkatan pendapatan daerah dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar pajak;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur bidang pendapatan;
4. Memaksimalkan petugas yang ada dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
5. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan sebaik-baiknya (ramah, transparan, cepat dan mudah);
6. Fasilitas IT yang memadai, fasilitas IT yang memadai menjamin adanya kemajuan dan percepatan serta keakuratan data yang memadai, Wajib Pajak/Wajib Retribusi bisa membayar pajak/retribusinya dimanapun dan kapanpun.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berkenaan. Perencanaan kinerja, mencakup rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya pada tahun berkenaan.

Perencanaan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023, berpedoman pada beberapa dokumen yang merupakan amanat dan ketentuan peraturan perundangundangan, baik yang ditetapkan oleh pusat maupun yang merupakan kebijakan lokal daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
- s. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- v. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- w. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021;
- x. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa nomor 75 tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa; dan

y. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 85 Tahun 2021 tentang Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

z. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor : 85 Tahun 2021 Tentang Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

Dalam melakukan perencanaan kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa mengidentifikasi sejumlah komponen pembentuk rencana kerja yang berkaitan dengan data atau informasi tentang:

- a. Sasaran Strategis, beserta indikator kinerja sasaran strategis dan rencana capaiannya (target kinerja sasaran);
- b. Program, beserta indikator kinerja program dan rencana capaiannya (target kinerja program);
- c. Kegiatan, beserta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya (target kinerja kegiatan);
- d. Sub Kegiatan, beserta indikator kinerja Sub Kegiatan dan rencana capaiannya (target kinerja sub kegiatan); dan
- e. penjelasan tentang keterkaitan antara sasaran program, kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain.

Sasaran yang dimaksud pada perencanaan kinerja ini adalah sasaran perangkat daerah sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yang selanjutnya akan diupayakan untuk diwujudkan pada tahun berkenaan melalui penetapan indikator dan rencana realisasi kinerja (target). Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya akan diidentifikasi dan ditentukan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan, sebagai

pilihan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, yang menjadi ukuran keberhasilan yang menggambarkan perwujudan sebuah kinerja suatu program, kegiatan atau sub kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok: Masukan (inputs), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya; Keluaran (outputs), adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu sub kegiatan dalam suatu kegiatanberdasarkan masukan (inputs) yang digunakan. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsiya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Indikator outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi harapan pengguna atau kelompok penerima manfaat.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan tersebut, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sumbawa. Penetapan indikator kinerja Tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa telah didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir, dengan mempertimbangkan konsepsi SMART yang dikemukakan oleh BPKP-RI yaitu bahwa syarat sebuah indikator kinerja hendaknya memenuhi syarat: *Stretching and specific* (fleksibel, tidak kaku dan spesifik); *Measurable* (dapat diukur); *Agreed* (disepakati oleh atasan dan bawahan ataupun secara lebih luas oleh organisasi); *Realistic* (sasaran ditetapkan secara realistis); dan *Time related* (berdasarkan periode waktu tertentu), yang sedikit berbeda dengan konsepsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa indikator yang baik harus SMART-C: “*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously-improved*”. Selain memperhatikan syarat-syarat pada kedua konsepsi tersebut, pada proses penyusunan IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa juga mengaplikasikan konsepsi *cascading process* dan *alignment process*. Kedua proses tersebut merupakan proses menurunkan Sasaran Strategis dan IKU ke level yang lebih rendah serta untuk menjamin bahwa Sasaran Strategis dan IKU yang dibangun telah selaras atau saling terkait antar setiap level. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Maka IKU perlu ditetapkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintahan

sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan struktur dalam organisasi.

2.1 Tujuan dan sasaran jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan tujuan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD. Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesuaian dengan kewenangan, yaitu yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik melalui gerakan atau program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan/pelaksanaan tugas/Fungsi/kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan daerah Kabupaten
Sumbawa 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan Asli daerah dengan Peningkatan kualitas reformasi birokrasi		Nilai Reformasi Birokrasi	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50
		Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat hasil evaluasi AKIP Bapenda	79,96	80,36	80,37	80,38	80,39
		Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	86.977.189.508	56.468.680.458	64.256.981.438	97.755.880.389	107.531.468.428

Dalam menjalankan visi serta misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat dijabarkan melalui tujuan serta sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah implementasi atau perjabaran dari misi yang pencapaiannya dalam kurun waktu tertentu, 1 tahun atau sampai dengan 5 tahun. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa menetapkan tujuan yang merupakan implementasi dari misi sebagaimana terlihat pada *Tabel 2.1*

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang ingin dicapai dalam waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik, terukur, menantang namun dapat diukur dengan memanfaatkan alokasi sumber daya yang ada, Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa dijelaskan dalam .

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, serta hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator bisa dilihat di Matrik Renstra Bapenda Kabupaten Sumbawa.

2.2 Strategis dan Kebijakan Badan Pendapatan daerah

2.2.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas diperlukan strategi yang memuat cara-cara yang di rancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan SKPD. Agar strategi yang dirumuskan benar-banar sesuai dengan situasi, kondisi, potensi dan permasalahan yang ada secara obyektif.

Strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai berikut;

1. Penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Refocussing kebijakan ekonomi daerah untuk mendukung sector penyumbang PAD
3. Peningkatan kualitas layanan pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Optimalisasi system dan teknologi informasi;
6. Pembaruan database pajak secara real time;
7. Penguatan sosialisasi secara luas dan kreatif
8. Penerapan Insentif dan sanksi.

2.2.2 Kebijakan

Untuk mencapai sasaran - sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Menyusun Strategis dan kebijakan yang akan di tempuh. maka selama periode tahun 2021 - 2026 arah kebijakan yang di tempuh Bapenda Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian dan pembinaan Wajib pajak
2. Kerja sama dengan lembaga sertifikasi terkait standar ISO
3. Bimbingan Teknis Kompetensi layanan perpajakan
4. Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi
5. Koordinasi dengan stakeholder terkait
6. Pemetaan terhadap potensi pendapatan sesuai kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Validasi data potensi penerimaan pendapatan asli daerah.
8. Pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 2.2

Rencana Strategis dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa 2021 -2026

Visi : Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban								
Misi ke 3 : Sumbawa Bersih dan Melayani								
Tujuan		Sasaran			Cara mencapai Tujuan dan sasaran			
Uraian		Indikator	Uraian	Indikator	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah dengan Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dengan	Nilai Reformasi Birokrasi .	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat Hasil AKIP Bapenda	Peningkatan kualitas layanan Pajak dan Retribusi	Pengendalian dan Pembinaan Wajib Pajak	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kota/Kabupaten	Nilai Akip Bapenda	
Kerja sama dengan lembaga sertifikasi terkait standar ISO								

Indikator			Peningkatan Kualitas SDM	Bimbingan Teknis Kompetensi Layanan Perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Pendataan, Pendaftran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	
	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Penguatan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi; Koordinasi dengan stakeholder terkait;			
			Refocusing kebijakan ekonomi daerah untuk mendukung sector penyumbang PAD	Pemetaan terhadap potensi pendapatan sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			
			Optimalisasi system dan teknologi informasi	Validasi data potensi penerimaan pendapatan asli daerah;			
			Pembaharuan database pajak secara real time	Pemanfaatan teknologi informasi			
			Penguatan sosialisasi secara luas dan kreatif	Pengendalian dan pembinaan wajib pajak;			
					Jumlah Realisasi		

					Penerapan Insentif dan sanksi		Pajak Daerah	
							Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Obyek Retribusi Daerah, Pajak daerah dan Transfer Antar Daerah	

2.3 Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan pengutusan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja strategis, namun juga pada indikator kinerja yang dihasilkan atas kegiatan dan/atau sub kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat pelaksanaan sejumlah kegiatan dan sub kegiatan di dalamnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan pada level sasaran strategis akan dipengaruhi oleh capaian kinerja outcome yang dihasilkan, yang dipengaruhi oleh capaian kinerja output kegiatan dan/atau sub kegiatan, sehingga terwujud kesinambungan kinerja pada setiap jenjangnya. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa difasilitasi penyusunannya oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa selaku kepala perangkat daerah. Selain PK antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Sumbawa, di internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa juga dilakukan perikatan secara individual (PK Individu) seluruh ASN pada setiap jenjang/struktur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagai implementasi kebijakan daerah yang berkomitmen untuk memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA

Nama : AGUS MUSTAMIN,S.SOS. M,SI
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Eselonering : II/b
Unit Kerja : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	
			Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	
1	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori predikat hasil evaluasi AKIP Bapenda	Point	80,37	
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	RP	64.256.981.438	

- Program

Anggaran
- 1

Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Rp. 8.244.632.237
- 2

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp. 1.042.578.125

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa melakukan pengukuran atas perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara

data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Secara konseptual, penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize dan minimize. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi dan nilai kinerja mengacu pada beberapa pilihan metode berikut ini:

- 1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi

Maximize

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

- 2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi

Minimize

$$\text{Indeks Capaian} = (1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})) \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

- 3) Nilai Kinerja

Perhitungan Nilai Kinerja untuk mendapatkan NKO dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan

formula penghitungan Indikator Kinerja untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

b. Perhitungan Nilai Kinerja Agregat

Perhitungan nilai kinerja agregat dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh Capaian Indikator Kinerja sebagai nilai *mean* Capaian Indikator Kinerja keseluruhan.

Kategori nilai realisasi dan capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
- ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
- ≤90	Tinggi	
- ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
- ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
0	Sangat Rendah	memenuhi/masih dibawahpersyaratana minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, dipersyaratkan bahwa informasi atau data tentang realisasi atau tingkat capaian suatu indikator harus berasal dari sumber yang dapat diakui dan dipercaya keabsahannya, baik dari sisi tata cara atau metode perhitungan dan dari sisi pihak yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian sampai dengan publikasinya. Data atau informasi tentang capaian kinerja yang disajikan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan/atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik.

Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa perlu menetapkan Indikator Utama dilingkungan Badan Pendapatan Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

Tabel 2.4 IKU/Defnisi Operasional

No	Sasaran	IKU/IK	Defnisi Operasional	Formulasi / Sumber Data	Target
Indikator Kinerja Sasaran Strategis					
1	AKUNTABILITAS KINERJA BAPENDA	KATEGORI PREDIKAT HASIL EVALUASI AKIP BAPENDA	Adalah kategori nilai AKIP-PD yang merupakan hasil pengkategorian nilai AKIP-PD atas penilaian AKIP-PD oleh Inspektorat. Terdiri dari 7 kategori yang masing-masing memiliki interval nilai yang dimulai dari kategori terendah yaitu Kategori D, C, DD, B, BB, A sampai dengan kategori AA	Kategori nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah pada tahun n yang dipublikasikan oleh Inspektorat, dengan 7 kategori, yaitu: D (0-30); C (30-50); CC (50-60); B (60-70); BB (70-80); A (80-90); dan AA (90-100)	A
2	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Adalah Rasio Konektivitas Kabupaten yang menunjukkan keterhubungan	Akumulasi Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun n Realisasi bagi	100%

		wilayah dalam satu kabupaten	Target x 100%	
--	--	------------------------------	---------------	--

Indikator Kinerja Outcome Program				
1	Terlaksananya penyelenggaraan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sumbawa	Nilai AKIP Bapenda	Adalah jumlah nilai SAKIP-PD untuk tahun n yang dinilai dan dipublikasikan oleh Inspektorat	Penilaian Inspektorat
2	Terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase Capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	Adalah upaya peningkatan realisasi pendapatan Asli Daerah tahun n	Jumlah laporan bulanan / jumlah laporan Tahun N x 100%
		Jumlah Realisasi Pajak Daerah	Adalah upaya peningkatan realisasi pendapatan Asli Daerah tahun n	Jumlah Realisasi Pajak Daerah
		Persentase capaianj kinerja pembinaan dan pengawasan obyek pajak daerah, retribusi daerah dan transfer antar daerah	Adalah upaya peningkatan realisasi pendapatan Daerah tahun n	Jumlah Realisasi Dokumen Tahun N / Target Dokumen Tahun N x 100%
Indikator Kinerja Output Kegiatan				
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Adalah Dokumen yang dihasilkan atas Pelaksanaan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari semua sub
				12 Dok

			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kegiatan tahun n	
2	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Badan Pendapatan daerah	Jumlah keluaran pelaksanaan administrasi keuangan PD yang direncanakan	Adalah Dokumen yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari semua sub kegiatan tahun n	16 Dok
3	Tersedianya Dokumen Administrasi administrasi barang milik daerah pada Badan Pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik daerah yang disusun	Adalah Dokumen yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari semua sub kegiatan tahun n	3 dok
4	Tersedianya Dokumen Administrasi administrasi kepegawaian Badan Pendapatan daerah	Jumlah dokumen Administrasi kepegawaian PD yang disusun	Adalah Dokumen yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari semua sub kegiatan tahun n	7 Dokumen

			Perangkat Daerah		
5	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Badan Pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang disusun	Adalah Dokumen yang dihasilkan atas Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari semua sub kegiatan tahun n	82 dokumen
6	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Badan Pendapatan daerah	Penyedia jasa penunjangn urusan pemerintahan daerah	Adalah Dokumen yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari semua sub kegiatan tahun n	53 Dok
7	Tersedianya Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Badan Pendapatan daerah	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adalah Dokumen yang dihasilkan atas Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari semua sub kegiatan tahun n	47 unit

8	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PAD	Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari semua sub kegiatan tahunan	28 Dok
		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Penagihan PAD	Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari semua sub kegiatan tahunan	156 dok
		Jumlah Dokumen Analisis Kebijakan Pengelolaan PAD dan Transfer antar Daerah	Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari semua sub kegiatan tahunan	23 dok

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah memberikan pedoman bagi perumusan acuan terhadap ukuran kinerja dalam rangka menetapkan rencana kerja tahunan. Menyampaian rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2021 – 2026

Rencana Kerja Tahunan

Program dan Kegiatan Pendapatan Daerah membidangi urusan keuangan untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan rencana capaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sistematis Program dan Kegiatan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa memuat informasi mengenai sasaran yang ingin di capai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Selain itu dokumen rencana kinerja tahunan juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di sajikan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Rencana Kerja Tahunan Perubahan Tahun 2023

Sasaran Strategis				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
Uraian	Indikator	Rencana Capaian	Tingkat	Satuan				
					Urusan Penunjang			
Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori predikat hasil evaluasi AKIP Bapenda	80,37		point	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai AKIP Bapenda	100%
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	12 dokumen
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen

					Daerah		
					Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
					Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
					Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
					Koordinasi dan	jumlah laporan capaian	3 laporan

					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	16 dokumen
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 org/bln
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen
					Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi	1 dokumen

						Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen dan koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan
						Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 dokumen
						Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan laporan Keuangan	8 laporan

						Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen
				3. Administrasi Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun	3 dokumen
					Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 dokumen
					Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan
				4. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	7 dokumen
					pendataan dan pengelolaan	Jumlah dokumen	7 dokumen

					administrasi kepegawaian	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	
				5. Administrasi Umum dan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	1 paket
					Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	32 laporan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3 dokumen
				6. Penyedia Jasa Penunjang		Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53 dokumen

					Urusan Pemerintahan Daerah		yang disusun	
					Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 laporan	
					Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	
					Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35 laporan	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 laporan	
					7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	47 unit	

				Urusan Pemerintahan Daerah			
					Penyediaan Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit
					Penyediaan Pemeliharaan, Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 unit
					Pemeliharaan /Rehabilitasi saranan dan Prasarana gedung kantor atau bangunana lainnya	Jumlah saranan dan Prasarana gedung kantor atau bangunana lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	1 unit
Meningkatn ya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapata n Asli Daerah	102.426.318.793	Rp.	2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	102.426.318.793

						Percentase Capaian Kluerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	100%
				8. Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	28 dokumen
					Penyediaan sarana dan prasana Pengelolaan Pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	5 unit
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 laporan
					Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	2 laporan
					Penilaian Pajak Bumi dan	Jumlah objek pajak	241353 Obyek

					Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	yang disesuaikan NJO/nya	pajak
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	9 dokumen
						Jumlah Realisasi Pajak Daerah	78.074.934.520
				8. Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	156 dokumen
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	6 laporan
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	12 layanan
					Penagihan Pajak daerah	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	2 dokumen

					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	25 dokumen
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 dokumen
						Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Objek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer antar daerah.	100
				8. Pengelolaan Pendapatan Daerah		<i>Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Objek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah</i>	23 dokumen

					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen
					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kebijakan Pajak daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	5 dokumen
					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 dokumen
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat capaian indicator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada tahun 2023
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian Kinerja.

Pada bagian ini, akan disajikan uraian capaian kinerja IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023. Pengukuran capaian IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 tersebut dilakukan sesuai tata cara pengukuran yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, termasuk memberikan penilaian kualitatif atas capaian kinerja dari masing-masing IKU. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahann atas Peraturan Bupati Sumbawa No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, menetapkan 2 (dua) indikator sasaran strategis yang akan diperjanjikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Sumbawa dalam Perjanjian

Kinerja (PK) setiap tahunnya, yang dimulai dari Tahun 2021. Berikut disajikan *cascading* tiap indikator sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan menjadi IKU dalam dokumen PK. Pada masing-masing IKU akan disajikan nilai atau jumlah target, realisasi dan capaiannya, kendala atau hambatan, serta dukungan dan upaya dilakukan terhadap tingkat ketercapaian setiap indikator sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Kategori	A	BB	98,62	
2	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	102.426.318.793,00	65.415.272.330,97	63,87	
		Rata-Rata				81,24	
		Tertinggi				98,62	
		Terendah				63,87	

1. Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang dan apabila diterapkan dalam pajak daerah, laju pertumbuhan ini adalah proses kenaikan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan

meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya.

Tabel 3.2

Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi
1	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Nilai AKIP PD tahun n-1 publikasi APIP tahun n
2	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	PP Nomor 35 Tahun 2023 ttg ketentuan umum pajak dan retribusi daerah	Rata-rata Capaian Kinerja program Pengelolaan Pendapatan tahun n

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Tabel 3.3

TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian Kinerja
1	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Kategori	A	BB	98,62	Sangat Tinggi

2	Meningkat nya Jumlah Pendapata n Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	%	102.426.318.793,00	65.415.272.330,97	63,87	Sangat baik
		Capaian Rata- Rata	%			81,24	
		Capaian Tertinggi	%			98,62	
		Capaian Terendah	%			63,87	

Memperhatikan data kuantitatif yang menggambarkan target dan realisasi kinerja sasaran Strategis untuk tahun 2023, Sasaran Strategis akuntabilitas kinerja Bapenda dari target 80,37% terealisasi 79,26 atau tercapai 98,62% dan Sasaran Trategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari target Rp. 102.426.318.793,00 terealisasi 65.415.272.330,97 atau tercapai 63,87% .

Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 berada dalam interval di atas 80% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi dan realisasi kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah pada Tahun 2023 berada dalam interval di atas 50% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat Baik” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun anggaran sebelumnya

Perbandingan Capaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

PEMBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN N DENGAN TAHUN N-1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun n-1 (2022)	Capaian Tahun n (2023)	Naik (+)/ Turun (-)
1	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	1	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Kategori	100	98,62	-1,38
2	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	104,24	63,87	-40,37

4. Perbandingan antara realisasi kinerja s.d tahun n dengan target Renstra

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa melaksanakan tugasnya berdasarkan Rencana Strategis yang perbandingan realisasi kinerja dengan Rencana Strategis disajikan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun terjadi beberapa perubahan indicator sasaran yang semula berupa prosentase menjadi angka capaian realisasi.

Tabel 3.5

PEMBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN N DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA Tahun Akhir (2026)	Realisasi Tahun n (2023)	Keterangan	
1	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Kategori	A	BB	1,1	Tercapai
2	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	112.925.016.469,00	65.415.272.330,97	(47.509.744.138,03)	belum tercapai

5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Standar Propinsi dan Nasional

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah tidak bisa dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau capaian kinerja Pemerintah propinsi secara keseluruhan karena berbeda-beda dalam menentukan indikator dan formula indikatornya. Sehingga yang dibandingkan dengan pemerintah daerah terkait dengan capaian Akuntabilitas Kinerja dan capaian Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.6

PEMBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN N DENGAN KINERJA PROVINSI DAN TARGET NASIONAL TAHUN N

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun n (2023)	Realisasi PemProv Tahun n (2023)	Target Nasional Tahun n (2023)	Keteran gan
1	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Kategori	BB	A	-	Tidak Terdapat data target nasional
2	Meningkatny a Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	65.415.272.330,97	2.788.986.940.955,00	-	
		Rata-Rata					
		Tertinggi					
		Terendah					

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan

pendapatan daerah yang meliputi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

Pencapaian Kinerja badan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 dapat disampaikan sebagi berikut:

Tabel 3.7

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian	Alternatif Solusi/Strategi
1	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	98,62	1 Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Sumbawa Tahun 2023 atas kinerja tahun 2022 menggunakan permenpan RB No.88 Tahun 2021 dengan 4 (empat) komponen/sub komponen/kriteria penilaian, sedangkan LKjIP PD yang disusun serta target yang dirumuskan masih berpedoman pada Permenpan RB No.12 Tahun 2015, dengan 5 (lima) komponen/sub komponen/kriteria penilaian, hal itulah yang menyebabkan penurunan realisasi kinerja	1 Menyusun LKjIP perangkat daerah tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru
				2 Dipengaruhi oleh tidak aktifnya Web Bappenda dan Masih terdapat beberapa catatan atas kekurangan untuk melakukan perbaikan manajemen kinerja Bapenda	2 Menindaklanjuti rekomendasi terhadap hasil penilaian AKIP tahun 2023
2	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	63,87	1 Peningkatan kapasitas SDM terutama tentang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah	1 Mengikutsertakan personil untuk ikut Bimtek penagihan pajak daerah/juru sita untuk peningkatan kapasitas aparaturnya
				2 Luasnya wilayah dan masih adanya daerah terpencil yang sulit jangkauan internet	3 Pengembangan jaringan oleh pemerintah daerah terhadap daerah sulit dijangkau

				3	Belum dilaksanakan kegiatan pemutakhiran data PBB.P2 secara menyeluruh	4	Dukungan anggaran untuk kegiatan pemutakhiran data
				4	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak daerah	5	Kerjasama dengan Perangkat Daerah/Institusi lain antara lain Kejaksaan Negeri dan Polresta Sumbawa terkait dengan pembinaan wajib pajak

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tata kelola sebuah organisasi pemerintahan tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupakan asset organisasi tersebut. Mempertimbangkan konsep “5m+1i” (Man; Money; Material; Machine; Methode; Information), dimana 5m tersebut adalah sumber daya fisik yang berwujud, sedangkan informasi merupakan sumber daya konseptual. Sumber daya konseptual ini dipakai oleh para penyelenggara pemerintahan untuk mengelola sumber daya fisik. Sumber daya informasi bukan hanya informasi dan data, tetapi juga terkait dengan sejumlah peralatan pendukungnya seperti perangkat keras dan lunak komputer, *data base*, jaringan, dan lain-lain.

Sumber daya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, secara terus menerus di tata ulang agar siap pakai terutama ketika terjadi suatu suatu perubahan agar tetap dapat cepat beroperasi dan selalu dapat menghasilkan daya guna atau manfaat yang lebih tinggi atau semakin baik. Misalnya pelatihan pegawai, yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia, penggantian mesin lama dengan mesin baru yang lebih modern. Semua usaha tersebut ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan tiap sumber daya, meminimalkan waktu yang terbuang, serta mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas setiap unit kerja. Memperhatikan konsepsi di atas, maka berikut disampaikan analisis

atas efisiensi penggunaan sumber daya, yang dalam penyajian ini diutamakan pada efisiensi penggunaan anggaran. Sementara sumber daya berupa sumber daya manusia, methode (SOP), peralatan dan perlengkapan (machine), bahan baku (material) dan informasi tidak dianalisis secara khusus tetapi akan menjadi bagian langsung dalam uraian analisis.

Analisis atas efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.8

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Pagu Indikatif RENSTRA Tahun 2023 (Rp)	DPPA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	% DPPA - RENST RA	% Realisasi - Aloka si	Pelaksana Program
1	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Kategori Predikat Hasil Evalnasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	9.287.210.362	9.915.786.745	8.865.432.033	106,77	89,41	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP Bapenda	8.244.632.237	8.608.476.220	7.586.334.060	104,41	88,13	Sekdis
	Tersusunnya Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	73.180.280	96.813.280	93.578.280	132,29	98,68	
	Tersusunnya Dok Perencanaan PD	Jumlah Dok Perencanaan PD	8.628.500	25.128.500,00	25.128.500,00	291,23	100,00	
	Tersedianya Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	6.599.780	6.599.780,00	6.599.780,00	100,00	100,00	
	Tersedianya Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	4.373.600	4.373.600,00	4.373.600,00	100,00	100,00	
	Tersedianya Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	8.846.800	6.846.600,00	6.846.600,00	100,00	100,00	

	Tersedianya Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	3.299.800	3.299.800,00	3.299.800,00	100,00	100,00	
	Tersedianya Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000	13.741.000,00	13.738.000,00	100,00	99,98	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	29.691.000	36.824.000,00	33.592.000,00	124,02	91,22	
	Tersusunnya Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.157.932.582	7.450.150.565	6.542.879.412	104,08	87,82	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.133.386.282	7.425.604.265	6.518.354.112	104,10	87,78	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000	3.712.000,00	3.712.000,00	100,00	100,00	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800	3.312.800,00	3.312.800,00	100,00	100,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500	2.114.500,00	2.093.500,00	100,00	99,01	
	Tersedianya Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000	3.714.000,00	3.714.000,00	100,00	100,00	
	Tersedianya Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3.863.000	3.863.000,00	3.863.000,00	100,00	100,00	
	Tersedianya Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.488.000	2.488.000,00	2.488.000,00	100,00	100,00	

	Tersedianya Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000	5.342.000,00	5.342.000,00	100,00	100,00	
	Tersusunnya Dok Administrasi BMD pada PD	Jumlah Dok Administrasi BMD pada PD	4.104.500,00	4.104.500,00	4.104.500,00	100,00	100,00	
	Tersedianya RKBMD SKPD	Jumlah RKBMD SKPD	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	100,00	100,00	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap BMD pada SKPD	Jumlah Lap Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap BMD pada SKPD	1.099.500,00	1.099.500,00	1.099.500,00	100,00	100,00	
	Tersusunnya Dok Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	100,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	100,00	
	Tersusunnya Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.896.075	225.419.075	199.848.938	128,15	88,57	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.542.875,00	4.542.875,00	4.542.872,00	100,00	100,00	
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitas Kunjungan Tamu	40.447.000,00	40.447.000,00	23.814.000,00	100,00	59,12	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.763.000	178.286.000,00	169.048.866,00	138,46	94,82	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.143.200,00	2.143.200,00	2.143.200,00	100,00	100,00	
	Tersusunnya Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.998.000	603.992.600	541.860.401	103,25	89,71	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.538.000	12.538.000	12.526.000	100,00	99,90	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	110.140.000	110.140.000	85.267.821	100,00	77,42	

	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45.600.000,00	51.594.800	51.340.000	113,15	99,51	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	416.720.000,00	429.720.000	392.726.580	103,12	91,39	
	Tersusunnya Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.320.800	225.796.200	202.082.529	91,67	89,49	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	205.565.800	182.801.200	166.502.189	88,93	91,08	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20.755.000	20.755.000	14.139.340	100,00	68,12	
	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20.000.000,00	22.240.000	21.421.000	111,20	96,32	
2	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.042.578.125	1.307.310.525	1.279.097.973	125,39	97,84	
	Terlaksananya pendataan , Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak daerah	Capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	321.406.825	378.017.825	374.130.000	117,61	98,97	Kabid Pendataan dan penetapan Pajak daerah
	Tersusunnya pendataan , Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak daerah	Jumlah Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak daerah	321.406.825	378.017.825	374.130.000	117,61	98,97	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	92.913.325,00	126.279.325	125.956.500	135,91	99,74	
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	82.205.000,00	99.450.000	96.303.000	120,98	96,84	

	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18.456.000,00	18.456.000	18.236.000	100,00	98,81	
	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	37.168.500,00	37.168.500	37.106.500	100,00	99,83	
	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	90.664.000,00	96.664.000	96.528.000	106,62	99,86	
	Terlaksananya pembinaan, pemeriksaan dan penagihan Pajak daerah	Realisasi Pajak Daerah	340.286.900,00	366.918.900,00	361.430.500,00	107,83	98,50	Kabid Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
	Tersusunnya dokumen pembinaan, pemeriksaan dan penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	340.286.900,00	366.918.900,00	361.430.500,00	107,83	98,50	
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	110.021.300,00	101.048.300,00	99.574.050,00	91,84	98,54	
	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	28.710.000,00	28.710.000,00	28.417.850,00	100,00	98,98	
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	70.711.500,00	127.873.000,00	127.206.000,00	180,84	99,48	
	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.561.100,00	22.561.100,00	22.129.100,00	100,00	98,09	
	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	108.283.000,00	86.726.500,00	84.103.500,00	80,09	96,96	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan obyek retribusi, daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Obyek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer Antar Daerah	380.884.400,00	562.373.800,00	543.537.473,00	147,65	96,65	Kabid Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
	Tersusunnya dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah	380.884.400,00	562.373.800,00	543.537.473,00	147,65	96,65	

	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	13.950.500,00	13.950.500,00	12.806.500,00	100,00	92,52	
	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	330.618.000,00	512.105.400,00	498.986.073,00	154,89	97,05	
	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	20.931.900,00	20.931.900,00	20.670.900,00	100,00	98,75	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.386.000,00	15.386.000,00	12.974.000,00	100,00	84,32	
	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		-	-			

8. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023, diketahui bahwa memiliki target sebesar 1.307.310.525 sementara hasil pengukuran terhadap tahun 2023 mencapai 97,84%. Nilai realisasi tersebut lebih rendah dari nilai target yang ditetapkan dalam dokumen PK Tahun 2023 . Untuk tahun 2023, telah ditetapkan jumlah program prioritas yang dilaksanakan oleh sejumlah perangkat daerah. Program tersebut diketahui ada yang memiliki realisasi sesuai dengan target, dan terakumulasi menjadi pengaruh terhadap capaian pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.9

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP Bapenda	98,65	Dipengaruhi oleh tidak aktifnya Web Bappenda dan Masih terdapat beberapa catatan atas kekurangan untuk melakukan perbaikan manajemen kinerja Bapenda
	Tersusunnya Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100,00	
	Tersusunnya Dok Perencanaan PD	Jumlah Dok Perencanaan PD	100,00	
	Tersedianya Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	100,00	
	Tersedianya Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	100,00	
	Tersedianya Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	100,00	
	Tersedianya Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	100,00	
	Tersedianya Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	100,00	

	Tersusunnya Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00	
	Tersedianya Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	
	Tersedianya Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100,00	
	Tersedianya Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	100,00	
	Tersedianya Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00	
	Tersusunnya Dok Administrasi BMD pada PD	Jumlah Dok Administrasi BMD pada PD	100,00	
	Tersedianya RKBMD SKPD	Jumlah RKBMD SKPD	100,00	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap BMD pada SKPD	Jumlah Lap Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap BMD pada SKPD	100,00	

	Tersusunnya Dok Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,00	
	Tersusunnya Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00	
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitas Kunjungan Tamu	100,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,00	
	Tersusunnya Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	

	Tersusunnya Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00	
2	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
	Terlaksananya pendataan , Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak daerah	Capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	100,00	
	Tersusunnya pendataan , Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak daerah	Jumlah Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/ SP/WP Pajak daerah	100,00	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100,00	
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100,00	
	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100,00	
	Terpenuhiya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100,00	
	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100,00	

	Terlaksananya pembinaan , pemeriksaan dan penagihan Pajak daerah	Realisasi Pajak Daerah	60,63	Dipengaruhi oleh belum terbayarnya Pajak Mineral Bukan Logam oleh PT. Brantas Abipraya
	Tersusunnya dokumen pembinaan, pemeriksaan dan penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	100,00	
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100,00	
	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100,00	
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100,00	
	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100,00	
	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100,00	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan obyek retribusi,daerah, pajak daerah dan transfer anytar daerah	Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Objek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer Antar Daerah	100,00	
	Tersusunnya dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah	100,00	
	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100,00	
	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100,00	

	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100,00	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100,00	

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah dapat dicapai melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Dalam rangka meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum tergali secara optimal telah dilaksanakan pendataan objek pajak baru (OPB) ;
- b. Koordinasi secara intensif dengan Badan Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat meningkatnya penyaluran Dana Bagi Hasil dari Propinsi.dibandingkan dengan tahun 2022 besarnya selisih penyaluran Dana Tranfer antar Daerah dari propinsi sebesar 3.935.159.408. sedangkan total penerimaan Tranfer antar Daerah dari Propinsi tahun 2023 sebesar Rp. 82.564.525.730,-
- c. Pendataan dan pemutahiran data Objek pajak daerah;
- d. Mengintegrasikan Sosialisasi, mendata dan menagih setiap hari (SOMENTARI),
- e. meningkatkan kesadaran para wajib pajak agar mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak juga diadakan Sosialisasi dan pembinaan wajib pajak secara rutin .
- f. Penempatan tenaga pemdamping penagihan Pajak Kendaraan Bermotor.
- g. Penerapan Aplikasi V-Tax untuk pembayaran Pajak PBB.P2 dan BPHTB yang kerja sama dengan Bank BNI.

Dalam upaya pencapaian meningkatnya pendapatan Daerah ada beberapa permasalahan yang ditemui , antara lain :

- a. Masih adanya beberapa kebutuhan data dan informasi yang belum terakomodir ke dalam sistem(software) , sehingga bisa menghambat proses pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- b. Trend Pembayaran pajak oleh wajib pajak yang dilakukan di akhir tahun serta keterlambatan pembayaran pajak terhadap SKPD/SPPT yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- c. Rendahnya tingkat pembayaran piutang khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta adanya beberapa subjek pajak yang telah menutup usahanya.
- d. Belum adanya terealisasinya pajak mineral bukan logam dan batua (MBLB) oleh PT. Brantas atas sudah selesainya Pekerjaan Bendungasn Beringin Sila.
- e. Belum terlaksananya pemutakhiran data objek pajak daerah sehingga masih banyak Objek Pajak (OP) yang belum masuk dalam Data Objek Pajak Daerah atau kondisi Objek Pajak (OP) yang mengalami perubahan/perkembangan yang sudah tidak sesuai dengan data Objek Pajak (OP) yang dimiliki

Solusi atau langkah yang telah di ambil dalam rangka mengatasi permasalahan di atas adalah :

1. Melakukan pemutakhiran data PBB sesuai dengan kondisi di lapangan,
2. Peningkatan kegiatan pendataan wajib pajak baru secara terus menerus dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah.
3. Kegiatan sosialisasi lebih di intensifkan.
4. Kerja sama dengan pihak ketiga dalam penerimaan pembayaran PBB.P2 dan BPHTB lebih di optimalkan.
5. Penambahan Pemasangan Aplikasi OTM baru .
6. Penempatan tenaga pendamping penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di tingkatkan.

A. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan anlisis akuntabilitas kinerja seperti tersebut pada target dan realisasi dari anggaran dapat tercapai seperti pada sebagai berikut :

Tabel 3.10

Anggaran dan Realisasi Belanja per sasaran Tahun 2023

no	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	A	BB	98,62	8.608.476.220,00	7.586.334.060,00	88,13
2	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	102.426.318.793	65.415.272.330,97	63,87	1.307.310.525,00	1.279.197.973,00	97,85
Jumlah						9.915.786.745,00	8.865.532.033,00	89,41

Tabel 3.11

Alokasi dan Belanja Bapenda Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

N o	SS-PD Urusan/Program/Kegiatan /Subkegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
1	2		5	6	7
1	SASARAN 1	IS-1	5	6	7
	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori predikat hasil evaluasi AKIP Bapenda	80,37	79,26	98,62
A	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Bapenda	8.608.476.220,00	7.586.334.060,00	88,13
1	Perencanaan , Penganggaran dan	Jumlah Dokumen Perencanaan,	96.813.280,00	93.578.280,00	96,66

N o	SS-PD Urusan/Program/Kegiatan /Subkegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
1	2		5	6	7
1	SASARAN 1	IS-1	5	6	7
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.128.500,00	25.128.500,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.599.780,00	6.599.780,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.373.600,00	4.373.600,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.846.600,00	6.846.600,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.299.800,00	3.299.800,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	13.741.000,00	13.738.000,00	99,98
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	36.824.000,00	33.592.000,00	91,22
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	7.460.160.665,00	6.542.879.412,00	87,82
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	7.425.604.265,00	6.518.354.112,00	87,78
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3.712.000,00	3.712.000,00	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3.312.800,00	3.312.800,00	100,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2.114.500,00	2.093.500,00	99,01
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan	3.714.000,00	3.714.000,00	100,00

N o	SS-PD Urusan/Program/Kegiatan /Subkegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
1	2		5	6	7
1	SASARAN 1	IS-1	5	6	7
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	3.863.000,00	3.863.000,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.488.000,00	2.488.000,00	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5.342.000,00	5.342.000,00	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun	4.104.500,00	4.104.500,00	100,00
	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	3.005.000,00	3.005.000,00	100,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500,00	1.099.500,00	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah DOKumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	225.419.075,00	199.648.938,00	88,57
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.542.875,00	4.542.872,00	100,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	40.447.000,00	23.914.000,00	59,12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.286.000,00	169.048.866,00	94,82
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip	2.143.200,00	2.143.200,00	100,00

N o	SS-PD Urusan/Program/Kegiatan /Subkegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
1	2		5	6	7
1	SASARAN 1	IS-1	5	6	7
		dinamis pada SKPD			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah DOKumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	603.992.600,00	541.860.401,00	89,71
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12.538.000,00	12.526.000,00	99,90
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	110.140.000,00	85.267.821,00	77,42
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	51.594.600,00	51.340.000,00	99,51
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	429.720.000,00	392.726.580,00	91,39
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	225.796.200,00	202.062.529,00	89,48
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	182.801.200,00	166.502.189,00	91,08
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20.755.000,00	14.139.340,00	68,12
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kkantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	22.240.000,00	21.421.000,00	96,32
	SASARAN 2	IS-2			
	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.307.310.525	1.279.097.073	
B	Program pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase Capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	378.017.825	374.130.000	98,97
8	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	378.017.825	374.130.000	98,97
	Penyediaan saran dan Prasana Pengelolaan Pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	126.279.325,00	125.956.500	99,74

N o	SS-PD Urusan/Program/Kegiatan /Subkegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
1	2		5	6	7
1	SASARAN 1	IS-1	5	6	7
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	99.450.000,00	96.303.000	96,84
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	18.456.000,00	18.236.000	98,81
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	37.168.500,00	37.106.500	99,83
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	96.664.000,00	96.528.000	99,86
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Jumlah Realisasi Pajak daerah</i>	366.918.900	361.430.500	98,50
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	366.918.900	361.430.500	98,50
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	101.048.300,00	99.574.050	98,54
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	28.710.000,00	28.417.850	98,98
	Penagihan Pajak daerah	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	127.873.000,00	127.206.000	99,48
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	22.561.100,00	22.129.100	98,09
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	86.726.500,00	84.103.500	96,98
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Obyek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer antar daerah.	562.373.800	543.536.573	96,65
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah	562.373.800	543.536.573	96,65
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	13.950.500,00	12.906.500	92,52
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kibijakan Pajak daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan	512.105.400,00	496.986.073	97,05

N o	SS-PD Urusan/Program/Kegiatan /Subkegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
1	2		5	6	7
1	SASARAN 1	IS-1	5	6	7
		Pajak daerah			
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	20.931.900,00	20.670.000	98,75
	Pembinaan dan Pengawasanj Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.386.000,00	12.974.000	84,32
	Total		9.915.786.745	8.865.432.033	89,41

Keberhasilan mencapai target penggunaan anggaran BAPENDA pada Belanja Operasional dapat dilihat dari persentase capaian yaitu realisasi keuangan 89,41% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Akuntabilitas Keuangan dari Sisi Pendapatan

Akuntabilitas keuangan dari sisi pendapatan dimana target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 102.426.318.793. Realisasi penerimaan tercapai Rp. 65.413.536.831,97; atau 63,86%. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 95.010.132.085 , realisasai penerimaan sebesar Rp. 82.564.525.730,00 atau 86,90%

Capaian dari masing –masing penerimaan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Rincian Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	3	4	5	6
	PENDAPATAN	197.436.450.878,00	147.978.062.560,97	74,95
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.426.318.793,00	65.413.536.830,97	63,86
	<i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	<i>78.074.934.520,00</i>	<i>47.339.956.470,54</i>	<i>60,63</i>
	<i>Pajak Hotel</i>	<i>2.591.438.940,00</i>	<i>3.180.416.570,00</i>	
	Pajak Hotel	2.496.938.940,00	3.031.261.720,00	121,40
	Pajak Losmen	94.500.000,00	149.154.850,00	157,84
	Pajak Restoran			

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	3	4	5	6
		4.281.000.000,00	5.271.375.490,00	
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.313.000.000,00	1.174.571.435,00	89,46
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.968.000.000,00	4.096.804.055,00	138,03
	Pajak Hiburan	341.000.000,00	384.721.970,00	
	Pajak Pagelaran Kesenian /Musik/Tari/Busana	341.000.000,00	384.721.970,00	112,82
	Pajak Reklame	1.279.558.000,00	1.332.895.669,00	
	Pajak Reklame papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.279.558.000,00	1.332.895.669,00	104,17
	Pajak Penerangan Jalan	17.000.000.000,00	17.904.921.873,00	
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	-	4.836.000.425,00	0,00
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya	17.000.000.000,00	13.068.921.448,00	76,88
	Pajak Parkir	472.545.000,00	529.643.900,00	
	Pajak Parkir	472.545.000,00	529.643.900,00	112,08
	Pajak Air Tanah	366.450.000,00	396.183.266,00	
	Pajak Air Tanah	366.450.000,00	396.183.266,00	108,11
	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	20.650.000,00	
	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	20.650.000,00	51,63
	Pajak Minelar bukan logam dan batuan	36.802.942.580,00	2.074.379.868,00	
	Pajak Minelar bukan logam dan batuan lainnya	36.802.942.580,00	2.074.379.868,00	5,64
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.700.000.000,00	5.003.566.106,54	
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.700.000.000,00	5.003.566.106,54	74,68
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.200.000.000,00	11.241.201.758,00	
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak	6.950.000.000,00	9.339.772.140,00	134,39
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian Hak Baru	1.250.000.000,00	1.901.429.618,00	152,11
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.826.384.273,00	14.826.384.273,00	100,00
	Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Deviden) atas penyertaan Modal pada BUMN		-	
	Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Deviden) atas penyertaan Modal pada BUMN	14.826.384.273,00	14.826.384.273,00	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9.525.000.000,00	3.247.196.087,43	34,09
	Hasil Kerja sama Daerah		200.376.660,00	

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	3	4	5	6
	Jasa Giro		1.041.354.130,45	
	Jasa Giro Kas Daerah	3.875.000.000,00	993.504.633,67	25,64
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	20.654.456,38	
	Jasa Giro pada RekeningBos	-	27.195.040,40	
	Pendapatan Bunga atas penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.650.000.000,00	449.315.068,50	7,95
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara		727.764.840,79	
	Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan		73.732.034,22	
	Pendapatan Denda Pajak Daerah		97.296.086,00	
	Pendapatan Denda Pajak Hotel		1.866.000,00	
	Pendapatan Denda Pajak Restaoran		1.818.640,00	
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan			
	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan			
	Pendapatan Denda Pajak Parkir		8.240.940,00	
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah		272.054,00	
	Pendapatan Denda Pajak bumi dan banagunan (PBB-P2)		85.098.452,00	
	Pendapatan denda Retribusi daerah		10.741.500,00	
	Pendapatan dari Pengembalian		646.615.767,47	
	Pendapatan dari Pengembalaian kelebihan Pajak Penghasilan			
	Pendapatan dari Pengembalaian kelebihan gaji dan tunjangan		71.605.485,00	
	Pendapatan dari Pengembalaian kelebihan pembayaranperjalnaan Dinas		5.418.800,00	
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaranan JKK		569.591.482,47	
	PENDAPATAN TRANSFER	95.010.132.085,00	82.564.525.730,00	100,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.010.132.085,00	82.564.525.730,00	100,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.111.005.062,00	11.905.511.965,00	78,79
	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BENKB)	13.496.039.075,00	10.978.106.997,00	81,34
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	30.546.247.768,00	30.650.326.126,00	100,34
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	57.651.700,00	45.187.351,00	78,38
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	34.951.221.480,00	28.337.425.691,00	81,08

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	3	4	5	6
	Bantuan keuangan Khusus dari pemerintah Daerah Propinsi	847.967.000,00	647.967.600,00	76,41
	Pendapatan denda Retribusi daerah		10.741.500,00	
	Pendapatan dari Pengembalian		646.615.767,47	
	Pendapatan dari Pengembalaian kelebihan Pajak Penghasilan			
	Pendapatan dari Pengembalaian kelebihan gaji dan tunjangan		71.605.485,00	
	Pendapatan dari Pengembalaian kelebihan pembayaran perjalanan Dinas		5.418.800,00	
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran JKK		569.591.482,47	
	PENDAPATAN TRANSFER	95.010.132.085,00	82.564.525.730,00	86,90
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.010.132.085,00	82.564.525.730,00	86,90
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		-	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.111.005.062,00	11.905.511.965,00	78,79
	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13.496.039.075,00	10.978.106.997,00	81,34
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	30.546.247.768,00	30.650.326.126,00	100,34
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	57.651.700,00	45.187.351,00	78,38
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	34.951.221.480,00	28.337.425.691,00	81,08
	Bantuan keuangan Khusus dari pemerintah Daerah Propinsi	847.967.000,00	647.967.600,00	76,41

Realisasi PAD tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tercapai 63,86% berdasarkan komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah menunjukan bahwa Pajak Daerah telah tercapai 60,63%, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan tercapai 100% Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tercapai 34,09%. Penjabaran capaian kinerja SKPD terhadap Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Dana Transfer antar Daerah /DBH pajak Daerah dari Propinsi tahun 2023 disajikan dalam table sebagai berikut

Tabel. 3.13
Penjabaran capaian Kinerja OPD terhadap Realisasi Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana Pendapatan Transfer Antar
Daerah /DBH Pajak Daerah dari Propinsi Tahun 2023

Tabel 3.20

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.426.318.793	65.413.536.830,97	63,86
4.1.1	PAJAK DAERAH	78.074.934.520	47.339.956.470,54	60,63
4.1.01.06	Pajak Hotel			
	Capaian Kinerja	2.591.438.940	3.180.416.570	122,73
		Penerimaan Pajak Hotel tahun 2023 di peroleh dari pembayaran piutang pajak hotel tahun 2022 sebesar Rp131.238.625 dan Pembayaran pajak hotel tahu 2023 sebesar Rp. 3.049.177.945 penerimaan pajak hotel tahun 2023 telah mencapai lebih target yang ditetapkan dan mengalami kenaikan len bih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 1.150.943.257		
	Masalah			
	Solusi			
4.1.01.07	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.281.000.000	5.271.375.490	123,13
	Capaian Kinerja			
		Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2023 diperoleh dari Pembayaran Pajak Restoran yang disetorkan oleh SKPD, Sekolah dan beberapa Rumah Makan. Realisasi penerimaan pajak restoran terdiri dari pembayaran piutang pajak restoran tahun 2022 sebesar Rp. 75.099.439 dan penerimaan pajak restoran tahun 2023 sebesar Rp. 5.196.276.074.		
	Masalah			
	Solusi			
4.1.01.08	Pajak Hiburan			
	Capaian Kinerja	341.000.000	384.721.970	112,82
		Capaian Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2023 mencapai 112,82% Realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2023 terdiri dari pembayaran piutang pajak Reklame Tahun 2022 sebesar Rp. 43.863.678 dan Pembayaran Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp.340.858.292		
	Masalah			
	Solusi			
4.1.01.09	Pajak Reklame papan/Billboard/Videotron/Megatron			
	Capaian Kinerja	1.279.558.000	1.332.895.669	104,17
		Capaian Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2023 mencapai 104,17%. Realisasi sebesar Rp. 1.332.895.669		

	Masalah			
	Solusi			
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan			
	Capaian Kinerja	17.000.000.000	17.904.921.873	105,32
		Pajak Penerangan Jalan (PLN) diperoleh dari dua sumber yaitu dari PLN dan Non PLN (Perusahaan). Pembayaran oleh Wajib Pajak Penerangan Jalan dilakukan tepat waktu. Realisasi Pajak Penerangan Jalan terdiri dari pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 sebesar Rp. 36.770.210 dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 sebesar Rp. 17.868.151.663,-		
	Masalah	-		
	Solusi	-		
4.1.01.11	Pajak Parkir			
	Capaian Kinerja	472.545.000	529.643.900	112,08
		Penerimaan Pajak Parkir terdiri dari pembayaran piutang pajak parkir tahun 2022 sebesar Rp. 16.480.400 Dan pembayaran Pajak Parkir Tahun 2023 Rp.513.163.500 Capaian realisasi penerimaan pajak parkir telah melampaui arget yang ditetapkan yaitu sebesar 112,08%. Beberapa perusahaan yang memiliki nilai tagihan pajak parkir yang besar melakukan pembayaran pajak parkir pada akhir Triwulan IV, diantaranya PT Indomarco Prismatama Tbk dan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dll.		
	Masalah			
	Solusi			
4.1.01.12	Pajak Air Tanah			
	Capaian Kinerja	366.450.000	396.183.266	108,11
		Penerimaan Pajak Air Tanah terdiri dari pembayaran piutang pajak Tahun 2022 sebesar Rp.97.585.340 dan Pembayaran pajak tahun 2023 sebesar 298.597.926,-		
	Masalah			
	Solusi			
4.1.01.13	Pajak Sarang burung walet			
	Capaian Kinerja	40.000.000	20.650.000	51,63
		Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sebesar 51,63%		
	Masalah			
	Solusi			
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya			
	Capaian Kinerja	36.802.942.580	2.074.379.868	5,64
		Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya tidak tercapai dari tartget tahun 2023, Penerimaan Pajak MBLB terdiri dari penerimaan piutang pajak Tahun 2022 sebesar Rp.73.127.920 dan pembayaran		

		tahun 2023 sebesar 2.001.251.948.		
	Masalah	Ada SKPD an. PT. Brantas atas pekerjaan pembangunan Bendungan Beringin Sila yang telah terbit dari tahun 2022 sampai 2023 masih dalam proses penagihan .		
	Solusi	Dalam Proses Upaya Penagihan kepada PT. Brantas		
4.1.01.15	PBB.P2			
	Capaian Kinerja	6.700.000.000	5.003.566.106,54	74,68
		Realisasi PBB P2 Tahun 2023 terdiri dari perimaan pembayaran Piutang PBB Tahun 2022 sebesar 25.478.116 dan Pembayaran SPPT Massal dan Objek Pajak Baru Tahun 2023 sebesar 4.978.087.990		
	Masalah	Masalah Keterlambatan pembayaran pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2023 wajib Pajak.Solusi Penegasan koordinasi dan komunikasi antara Badan pendapatan Daerah dengan pemerintah Desa /Kelurahan, sehingga pemerintah Desa /Kelurahan dapat menghimbau kepada masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak PBB P2 tepat waktu dan melunasi tagihan pajak PBB P2 di tahun berikutnya.		
	Solusi			
4.1.01.16	BPHTB-Pemindahan Hak Baru			
	Capaian Kinerja	8.200.000.000	11.241.201.758	137,09
	Masalah			
	Solusi			
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan			
	Capaian Kinerja	14.826.384.273	14.826.384.273	100
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan bersumber dari BUMD (PT Bank Syariah NTB) dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Realisasi Tahun 2023 adalah 100,00%, pembayaran Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BMUD telah sesuai dengan MOU yang telah ditandatangani.		
	Masalah			
	Solusi			
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah			
	Capaian Kinerja	9.525.000.000	3.247.196.087,43	34,09
		Capaian Lain-lain PAD yang Sah mencapai 34,09%. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah telah mencapai hasil maksimal.		
	Masalah			

	Solusi			
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
	Capaian Kinerja	95.010.132.085	82.564.525.730	86,90
	Masalah	Masalah Masih ada Keterlambatan Transfer Pendapatan Transfer Antar Daerah ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Sumbawa untuk periode TW IV Tahun 2023		
	Solusi	Solusi Rekonsiliasi berkala dengan Badan Pendapatan Propinsi terkait dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah/Dana Bagi Hasil Pendapatan dari Propinsi.		

BAB IV

PENUTUP

laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2023 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam pelaksanaan pembangunan melalui sasaran yang tertuang di dalam Rencana Kerja. Laporan ini juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian kinerja sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan terhadap Pengukuran Kinerja Sasaran pada Tahun Anggaran 2023.

LKjIP ini merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Berdasarkan laporan ini kami menyajikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti yang diharapkan dan semoga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dalam penyempurnaan pelaporan kinerja ini di masa yang akan datang. Besar harapan kami bahwa LKjIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi upaya kita ke depan untuk membangun Kabupaten Sumbawa ini dengan lebih gemilang yang berkeadaban.

Sumbawa Besar, Pebruari 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa

AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
NIP. 19700823 199211 1 001

REKAPITUSI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023 PER TRIWULAN

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AKUNTABILITAS KINERJA BAPENDA	KATEGORI PREDIKAT HASIL EVALUASI AKIP BAPENDA	A	-	-	-	-	-	-	88	98,62
2	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.426.318.793	15.767.286.092,94	15,39	47.491.203.946,00	46,37	88.180.258.999,68	86,09	65.415.272.330,97	63,87

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
		Rp.	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
A	Program Peningkat Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.508.476.220	1.462.250.115	16,99	3.580.544.621	41,59	5.447.016.343	63,28	7.586.334.080	88,13
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.813.280	0	0,00	36.103.880	37,29	70.356.280	72,67	93.578.280	96,66
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.128.500,00	-	0,00	8.628.500,00	34,34	25.128.500,00	100,00	25.128.500,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.599.780,00	-	0,00	6.599.780,00	100,00	6.599.780,00	100,00	6.599.780,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.373.600,00	-	0,00	-	0,00	4.373.600,00	100,00	4.373.600,00	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.846.600,00	-	0,00	6.846.600,00	99,99	6.846.600,00	100,00	6.846.600,00	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.299.800,00	-	0,00	-	0,00	3.299.800,00	100,00	3.299.800,00	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000,00	-	0,00	4.920.000,00	35,81	10.678.000,00	77,71	13.738.000,00	99,98
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.824.000,00	-	0,00	9.110.000,00	24,74	13.430.000,00	36,47	33.592.000,00	91,22
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.450.150.565	1.349.337.741	18,11	3.199.885.301	42,95	4.750.848.430	63,77	6.542.879.412	87,82
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.425.604.265,00	1.349.337.741,00	18,17	3.189.447.501,00	42,95	4.739.961.630,00	63,83	6.518.354.112,00	87,78
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000,00	-	0,00	3.262.000,00	87,88	3.712.000,00	100,00	3.712.000,00	100,00
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800,00	-	0,00	3.312.800,00	100,00	3.312.800,00	100,00	3.312.800,00	100,00
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.093.500,00	99,01
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.714.000,00	100,00
6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000,00	-	0,00	3.863.000,00	100,00	3.863.000,00	100,00	3.863.000,00	100,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.488.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.488.000,00	100,00
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.342.000,00	100,00
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500	-	0,00	3.005.000	73,21	3.005.000	73,21	4.104.500	100,00
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	-	0,00	3.005.000,00	100,00	3.005.000,00	100,00	3.005.000,00	100,00
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.099.500,00	100,00
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	-	0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.200.000,00	-	0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.419.075	19.460.944	8,63	67.625.744	30,00	136.846.165	60,71	199.648.938	88,57
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	-	0,00	4.542.875,00	100,00	4.542.875,00	100,00	4.542.872,00	100,00
2	Facilitasi Kunjungan Tamu	40.447.000,00	-	0,00	8.601.000,00	21,26	15.451.000,00	38,20	23.914.000,00	59,12
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.286.000,00	19.460.944,00	10,92	52.338.669,00	29,36	114.709.090,00	64,34	169.048.866,00	94,82
4	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200,00	-	0,00	2.143.200,00	100,00	2.143.200,00	100,00	2.143.200,00	100,00
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.992.600	78.309.430	12,97	216.281.417	35,81	373.135.177	61,78	541.860.401	89,71
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.538.000,00	-	0,00	6.371.000,00	50,81	12.526.000,00	99,90	12.526.000,00	99,90
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000,00	-	0,00	26.841.842,00	24,37	54.281.457,00	49,28	85.267.821,00	77,42
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.594.600,00	4.290.000,00	8,31	8.580.000,00	16,63	26.470.000,00	51,30	51.340.000,00	99,51
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.720.000,00	74.019.430,00	17,23	174.488.575,00	40,61	279.857.720,00	65,13	392.726.580,00	91,39

g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.796.200	15.142.000	6,71	55.443.279	24,55	110.624.291	48,99	202.062.529	89,49
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Beronggangan Dinas	182.801.200,00	15.142.000,00	8,28	54.785.779,00	29,97	109.705.971,00	60,06	166.503.189,00	91,08
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas	20.755.000,00	-	0,00	657.500,00	3,17	838.320,00	4,04	14.139.340,00	68,12
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.240.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	21.421.000,00	96,32
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.307.310.525	80.035.306	6,12	212.638.306	16,27	525.854.933	40,22	1.279.197.973	97,83
h	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.307.310.525	80.035.306	6,12	212.638.306	16,27	525.854.933	40,22	1.279.197.973	97,83
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	126.279.325,00	-	0,00	-	0,00	5.160.000,00	4,09	125.956.500,00	99,74
2	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	99.450.000,00	8.400.000,00	8,45	19.065.000,00	19,17	53.763.000,00	54,06	96.303.000,00	96,84
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	16.456.000,00	-	0,00	12.076.000,00	65,48	17.336.000,00	93,93	18.236.000,00	98,61
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) serta Bea Perolehan	37.166.500,00	4.440.000,00	11,95	16.970.000,00	45,66	25.490.000,00	68,58	37.106.500,00	99,81
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	96.664.000,00	8.665.000,00	8,96	18.390.000,00	19,02	70.390.000,00	72,82	96.528.000,00	99,86
6	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	101.046.300,00	6.720.000,00	6,65	36.186.050,00	35,81	50.856.050,00	50,33	99.674.050,00	98,64
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	28.710.000,00	-	0,00	10.952.850,00	38,15	10.952.850,00	38,15	28.417.800,00	98,98
8	Pengalihan Pajak Daerah	127.873.000,00	27.341.500,00	21,38	42.336.500,00	33,11	80.801.000,00	63,19	127.006.000,00	99,48
9	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.561.300,00	-	0,00	7.573.100,00	33,57	7.573.100,00	33,57	22.129.100,00	98,09
10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	86.726.500,00	2.560.000,00	2,95	9.273.500,00	10,69	42.503.500,00	49,01	84.103.500,00	96,98
11	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	13.950.500,00	-	0,00	2.906.500,00	20,83	7.476.500,00	53,59	12.906.500,00	92,53
12	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	512.105.400,00	19.044.806,00	3,72	31.644.806,00	6,18	146.553.933,00	28,62	496.986.073,00	97,05
13	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.931.900,00	-	0,00	2.400.000,00	11,47	4.135.000,00	19,75	20.670.900,00	98,75
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15.386.000,00	2.864.000,00	18,61	2.864.000,00	18,61	2.864.000,00	18,61	12.974.000,00	84,32

Sumbawa Besar, 28 Desember 2022
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Sumbawa

 AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
 NIP. 19700828 199211 1 001



REKAPITUSI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023 PER TRIWULAN

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AKUNTABILITAS KINERJA BAPENDA	KATEGORI PREDIKAT HASIL EVALUASI AKIP BAPENDA	A	-	-						
2	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	54.256.981.438	9.417.163.443,94	14,66						

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Triwulan 1							
		Rp.	Realisasi	%						
a	b	c	d	e						
A	Program Peningjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.244.632.237	1.462.250.116	17,74						
a	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.180.280	0	0,00						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.628.500,00	-	0,00						
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.599.780,00	-	0,00						
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.373.600,00	-	0,00						
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.846.600,00	-	0,00						
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.299.800,00	-	0,00						
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000,00	-	0,00						
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.691.000,00	-	0,00						
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.157.932.582	1.349.337.741	18,85						
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.133.386.282,00	1.349.337.741,00	18,92						
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000,00	-	0,00						
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800,00	-	0,00						
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500,00	-	0,00						
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000,00	-	0,00						
6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000,00	-	0,00						
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.488.000,00	-	0,00						
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000,00	-	0,00						
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500	-	0,00						
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	-	0,00						
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500,00	-	0,00						
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	-	0,00						
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.200.000,00	-	0,00						
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.896.075	19.460.944	11,06						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	-	0,00						
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.447.000,00	-	0,00						
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.763.000,00	19.460.944,00	15,11						
4	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200,00	-							
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.998.000	78.309.430	13,39						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.538.000,00	-	0,00						
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000,00	-	0,00						
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.600.000,00	4.290.000,00	9,41						

4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.720.000,00	74.019.430,00	17,78					
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.320.800	15.142.000	6,15					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	205.565.800,00	15.142.000,00	7,37					
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	20.755.000,00	-	0,00					
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	-	0,00					
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.578.125	80.035.306	7,68					
h	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.042.578.125	80.035.306	7,68					
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	92.913.325,00	-	0,00					
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	82.208.000,00	8.400.000,00	10,22					
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18.456.000,00	-	0,00					
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.168.500,00	4.440.000,00	11,95					
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	90.664.000,00	8.685.000,00	9,56					
6	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	110.021.300,00	8.720.000,00	8,11					
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	28.710.000,00	-	0,00					
8	Pengalihan Pajak Daerah	70.711.500,00	27.341.500,00	38,67					
9	Penyediaan Kelembagaan Pajak Daerah	22.561.100,00	-	0,00					
10	Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Pajak Daerah	108.283.000,00	2.590.000,00	2,39					
11	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	13.950.500,00	-	0,00					
12	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	330.616.000,00	19.044.806,00	5,76					
13	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.931.900,00	-	0,00					
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15.386.000,00	2.864.000,00	18,63					

Sumbawa Besar, 31 Maret 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa


AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
NIP. 19700828 199211 1 001



REKAPITUSI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023 PER TRIWULAN

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AKUNTABILITAS KINERJA BAPENDA	KATEGORI PREDIKAT HASIL EVALUASI AKIP BAPENDA	A	-	-	-	-	-	-	BB	98,62
2	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.258.981.438	9.417.163.443,94	14,66	27.450.010.971,88	42,72				

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2					
		Rp.	Realisasi	%	Realisasi	%				
a	b	c	d	e	f	g				
A	Program Peningkat Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.244.632.237	1.482.250.115	17,74	3.580.544.621	43,43				
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.180.280	0	0,00	36.103.880	49,34				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.628.500,00	-	0,00	8.628.500,00	100,00				
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.599.780,00	-	0,00	6.599.780,00	100,00				
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.373.600,00	-	0,00	-	0,00				
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.846.600,00	-	0,00	6.845.600,00	99,99				
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.299.800,00	-	0,00	-	0,00				
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000,00	-	0,00	4.920.000,00	35,81				
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.691.000,00	-	0,00	9.110.000,00	30,68				
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.157.932.582	1.349.337.741	18,85	3.199.885.301	44,70				
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.133.386.282,00	1.349.337.741,00	18,92	3.189.447.501,00	44,71				
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000,00	-	0,00	3.262.000,00	87,88				
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800,00	-	0,00	3.312.800,00	100,00				
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500,00	-	0,00	-	0,00				
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000,00	-	0,00	-	0,00				
6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000,00	-	0,00	3.863.000,00	100,00				
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.486.000,00	-	0,00	-	0,00				
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000,00	-	0,00	-	0,00				
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500	-	0,00	3.005.000	73,21				
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	-	0,00	3.005.000,00	100,00				
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500,00	-	0,00	-	0,00				
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	-	0,00	2.200.000,00	100,00				
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.200.000,00	-	0,00	2.200.000,00	100,00				
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.896.075	19.460.944	11,06	67.625.744	38,45				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	-	0,00	4.542.875,00	100,00				
2	Fasilitas Kunjungan Tamu	40.447.000,00	-	0,00	8.601.000,00	21,26				
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.763.000,00	19.460.944,00	15,11	52.338.669,00	40,65				
4	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200,00	-		2.143.200,00					
f	Penyediaan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	584.998.000	78.309.430	13,39	216.281.417	36,97				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.538.000,00	-	0,00	6.371.000,00	50,81				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000,00	-	0,00	26.841.842,00	24,37				

3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	45.690.000,00	4.290.000,00	9,41	8.580.000,00	18,82			
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.720.000,00	74.019.430,00	17,76	174.488.575,00	41,87			
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.320.800	15.142.000	6,15	55.443.279	22,51			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	205.585.000,00	15.142.000,00	7,37	54.785.775,00	26,65			
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas	20.735.000,00	-	0,00	657.500,00	3,17			
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	-	0,00	-	0,00			
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.578.125	80.935.306	7,68	212.638.306	20,40			
h	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.042.578.125	80.935.306	7,68	212.638.306	20,40			
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	92.913.325,00	-	0,00	-	0,00			
2	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	82.205.000,00	8.400.000,00	10,22	19.065.000,00	23,19			
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18.456.000,00	-	0,00	12.075.000,00	65,43			
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) serta Bea Perolehan	37.158.500,00	4.440.000,00	11,95	16.970.000,00	45,66			
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	90.664.000,00	8.685.000,00	9,56	18.390.000,00	20,28			
6	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	110.021.300,00	5.720.000,00	6,11	36.186.050,00	32,85			
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	28.710.000,00	-	0,00	10.952.850,00	38,15			
8	Pengalihan Pajak Daerah	70.711.500,00	27.341.500,00	38,67	42.336.500,00	59,87			
9	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.561.100,00	-	0,00	7.573.100,00	33,57			
10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	108.283.000,00	2.560.000,00	2,36	9.273.500,00	8,56			
11	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	13.950.500,00	-	0,00	2.905.500,00	20,83			
12	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	130.616.000,00	19.044.806,00	5,76	31.644.806,00	9,57			
13	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.931.900,00	-	0,00	2.400.000,00	11,47			
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15.386.000,00	2.864.000,00	18,61	2.864.000,00	18,61			

Sumbawa Besar, 30 Juni 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa


AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
NIP. 19700828 219211 1 001



REKAPITUSI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023 PER TRIWULAN

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AKUNTABILITAS KINERJA BAPENDA	KATEGORI PREDIKAT HASIL EVALUASI AKJP BAPENDA	A	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	83.964.778.378,00	9.417.163.443,94	11,22	27.450.010.971,88	32,69	71.947.956.013,56	85,69		

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3			
		Rp.	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i		
A	Program Peninjauan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.244.832.237	1.482.250.115	17,74	3.580.544.821	43,43	6.447.018.343	66,07		
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.180.280	0	0,00	36.103.880	49,34	70.356.280	96,14		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.628.500,00	-	0,00	8.628.500,00	100,00	25.128.500,00	291,23		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.599.780,00	-	0,00	6.599.780,00	100,00	6.599.780,00	100,00		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.373.600,00	-	0,00	-	0,00	4.373.600,00	100,00		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.846.600,00	-	0,00	6.846.600,00	99,99	6.846.600,00	100,00		
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.299.800,00	-	0,00	-	0,00	3.299.800,00	100,00		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000,00	-	0,00	4.920.000,00	35,81	10.678.000,00	77,71		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.691.000,00	-	0,00	9.110.000,00	30,68	13.430.000,00	45,29		
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.157.932.582	1.349.337.741	18,85	3.199.885.301	44,70	4.750.849.430	66,37		
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.133.386.282,00	1.349.337.741,00	18,92	3.189.447.501,00	44,71	4.739.961.630,00	66,45		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000,00	-	0,00	3.262.000,00	87,88	3.712.000,00	100,00		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800,00	-	0,00	3.312.800,00	100,00	3.312.800,00	100,00		
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000,00	-	0,00	3.863.000,00	100,00	3.863.000,00	100,00		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.488.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500	-	0,00	3.005.000	73,21	3.005.000	73,21		
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	-	0,00	3.005.000,00	100,00	3.005.000,00	100,00		
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	-	0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.200.000,00	-	0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00		
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.896.075	19.460.944	11,06	67.625.744	38,45	136.846.165	77,80		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	-	0,00	4.542.875,00	100,00	4.542.875,00	100,00		
2	Facilitasi Kunjungan Tamu	40.447.000,00	-	0,00	8.601.000,00	21,26	15.451.000,00	38,20		
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.763.000,00	19.460.944,00	15,11	52.338.669,00	40,65	114.709.090,00	89,09		
4	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200,00	-	0,00	2.143.200,00	-	2.143.200,00	100,00		
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.998.000	78.309.430	13,39	216.281.417	36,97	373.135.177	63,78		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.538.000,00	-	0,00	6.371.000,00	50,81	12.526.000,00	99,90		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000,00	-	0,00	26.941.842,00	24,37	54.281.457,00	49,28		

3	Penyediaan Jasa Perakitan dan Perangkapan Kantor	45.600.000,00	4.290.000,00	9,41	8.580.000,00	18,82	26.470.000,00	58,05	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.720.000,00	74.019.435,00	17,76	174.488.575,00	41,87	279.857.720,00	67,16	
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.320.800	15.142.000	6,15	95.443.279	22,51	110.624.291	44,91	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	205.565.800,00	13.142.000,00	7,37	94.785.779,00	26,65	109.785.971,00	53,41	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	20.755.000,00	-	0,00	657.500,00	3,17	838.320,00	4,04	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.578.125	80.035.306	7,68	212.638.306	20,40	525.854.933	50,44	
h	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.042.578.125	80.035.306	7,68	212.638.306	20,40	525.854.933	50,44	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	92.913.325,00	-	0,00	-	0,00	5.100.000,00	5,55	
2	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	82.205.000,00	8.400.000,00	10,22	18.065.000,00	23,19	53.763.000,00	65,40	
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18.458.000,00	-	0,00	12.076.000,00	65,43	17.336.000,00	93,93	
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan	37.168.500,00	4.440.000,00	11,95	16.970.000,00	45,66	25.490.000,00	68,58	
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	90.604.000,00	8.665.000,00	9,56	18.390.000,00	20,28	70.390.000,00	77,64	
6	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	110.621.300,00	6.720.000,00	6,11	36.186.050,00	32,89	50.856.050,00	46,22	
7	Polayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	28.710.000,00	-	0,00	10.952.850,00	38,15	10.952.850,00	38,15	
8	Penagihan Pajak Daerah	70.711.500,00	27.341.500,00	38,67	42.336.500,00	38,67	80.801.000,00	114,27	
9	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.561.100,00	-	0,00	7.573.100,00	33,57	7.573.100,00	33,57	
10	Pengendalian, Pemonitoran dan Pengawasan Pajak Daerah	108.283.000,00	2.560.000,00	2,36	9.273.500,00	8,56	42.503.500,00	39,25	
11	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	13.950.500,00	-	0,00	2.906.500,00	20,83	7.476.500,00	53,59	
12	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	330.616.000,00	19.044.806,00	5,76	31.644.896,00	9,57	146.563.933,00	44,33	
13	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.931.900,00	-	0,00	2.400.000,00	11,47	4.135.000,00	19,75	
14	Pembiayaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15.386.000,00	2.864.000,00	18,61	2.664.000,00	18,61	2.864.000,00	18,61	

Sumbawa, Besar, 30 September 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa
AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
NIP. 19700828-199211 1 001

REKAPITUSI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023 PER TRIWULAN

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AKUNTABILITAS KINERJA BAPENDA	KATEGORI PREDIKAT HASIL EVALUASI AKIP BAPENDA	A	-	-	-	-	-	-	88	98,62
2	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.426.318.793	15.767.286.092,94	15,39	47.491.203.946,00	46,37	88.180.258.999,68	86,09	65.413.536.830,97	63,86

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
		Rp.	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
A	Program Peninjauan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.608.476.220	1.482.260.115	16,99	3.580.544.621	41,59	5.447.016.343	63,28	7.586.334.060	88,13
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.813.280	0	0,00	36.103.880	37,29	70.356.280	72,67	93.578.280	96,66
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.128.500,00	-	0,00	8.628.500,00	34,34	25.128.500,00	100,00	25.128.500,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.599.780,00	-	0,00	6.599.780,00	100,00	6.599.780,00	100,00	6.599.780,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.373.600,00	-	0,00	-	0,00	4.373.600,00	100,00	4.373.600,00	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.846.600,00	-	0,00	6.845.600,00	99,99	6.846.600,00	100,00	6.846.600,00	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.299.800,00	-	0,00	-	0,00	3.299.800,00	100,00	3.299.800,00	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000,00	-	0,00	4.920.000,00	35,81	10.678.000,00	77,71	13.738.000,00	99,98
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.824.000,00	-	0,00	9.110.000,00	24,74	13.430.000,00	36,47	33.592.000,00	91,21
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.450.150.565	1.349.337.741	18,11	3.199.885.901	42,95	4.750.849.430	63,77	6.542.879.412	87,82
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.425.604.265,00	1.349.337.741,00	18,17	3.189.447.501,00	42,95	4.739.961.630,00	63,83	6.518.354.112,00	87,78
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000,00	-	0,00	3.262.000,00	87,88	3.712.000,00	100,00	3.712.000,00	100,00
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800,00	-	0,00	3.312.800,00	100,00	3.312.800,00	100,00	3.312.800,00	100,00
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.714.000,00	100,00
6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000,00	-	0,00	3.863.000,00	100,00	3.863.000,00	100,00	3.863.000,00	100,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.488.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.488.000,00	100,00
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.342.000,00	100,00
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500	-	0,00	3.005.000	73,21	3.005.000	73,21	4.104.500	100,00
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	-	0,00	3.005.000,00	100,00	3.005.000,00	100,00	3.005.000,00	100,00
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.099.500,00	100,00
d	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	2.200.000,00	-	0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawainan	2.200.000,00	-	0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.419.075	19.460.944	8,63	67.625.744	30,00	136.846.165	60,71	199.648.938	88,57
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	-	0,00	4.542.875,00	100,00	4.542.875,00	100,00	4.542.872,00	100,00
2	Facilitas Kunjungan Tamu	40.447.000,00	-	0,00	8.601.000,00	21,26	15.451.000,00	38,20	23.914.000,00	59,12
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.286.000,00	19.460.944,00	10,92	52.338.669,00	29,36	114.709.090,00	64,34	169.048.866,00	94,82
4	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200,00	-	0,00	2.143.200,00	100,00	2.143.200,00	100,00	2.143.200,00	100,00
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.992.600	78.309.430	12,97	216.281.417	35,81	373.135.177	61,78	541.860.401	89,71
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.538.000,00	-	0,00	6.371.000,00	50,81	12.526.000,00	99,90	12.526.000,00	99,90
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000,00	-	0,00	26.841.842,00	24,37	54.281.457,00	49,28	85.267.821,00	77,42
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.594.600,00	4.290.000,00	8,31	8.580.000,00	16,63	26.470.000,00	51,30	51.340.000,00	99,51
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.720.000,00	74.019.430,00	17,23	174.488.575,00	40,61	279.857.720,00	65,13	392.726.580,00	91,39

g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.796.200	15.142.000	6,71	55.443.279	24,55	110.624.291	48,99	202.062.529	89,49
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	182.801.200,00	15.142.000,00	8,28	54.705.779,00	29,97	109.785.971,00	60,06	186.502.189,00	91,08
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	20.755.000,00	-	0,00	657.500,00	3,17	838.320,00	4,04	14.139.340,00	68,13
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.240.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	21.421.000,00	96,32
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.307.310.525	80.035.306	6,12	212.638.306	16,27	525.854.933	40,22	1.279.197.973	97,85
h	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.307.310.525	80.035.306	6,12	212.638.306	16,27	525.854.933	40,22	1.279.197.973	97,85
1	Penyediaan Sarana dan Prosesnya Pengelolaan Pajak Daerah	126.279.325,00	-	0,00	-	0,00	5.160.000,00	4,09	125.956.500,00	99,74
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	99.450.000,00	8.400.000,00	8,45	19.065.000,00	19,17	53.793.000,00	54,06	96.303.000,00	96,84
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18.456.000,00	-	0,00	12.075.000,00	65,43	17.336.000,00	93,93	18.236.000,00	98,81
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan	37.168.500,00	4.440.000,00	11,95	16.970.000,00	45,66	25.490.000,00	68,58	37.106.500,00	99,83
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	96.664.000,00	8.665.000,00	8,96	18.390.000,00	19,02	70.390.000,00	72,62	96.528.000,00	99,86
6	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	101.048.300,00	6.720.000,00	6,65	36.186.050,00	35,81	50.856.050,00	50,33	99.624.050,00	98,64
7	Pelaysan dan Konsultasi Pajak Daerah	28.710.000,00	-	0,00	10.952.850,00	38,15	10.902.850,00	38,15	28.417.850,00	98,98
8	Peragahan Pajak Daerah	127.873.000,00	27.341.500,00	21,38	42.336.500,00	33,11	80.801.000,00	63,19	127.206.000,00	99,48
9	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.561.100,00	-	0,00	7.573.100,00	33,57	7.573.100,00	33,57	22.129.100,00	98,09
10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	86.726.500,00	2.560.000,00	2,95	9.273.500,00	10,69	42.963.500,00	49,01	84.103.500,00	96,98
11	Pembinaan pengelolaan pajak daerah	13.950.500,00	-	0,00	2.906.500,00	20,83	7.476.500,00	53,59	12.906.500,00	92,52
12	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	512.105.400,00	19.044.806,00	3,72	31.644.806,00	6,18	146.553.912,00	28,62	496.986.073,00	97,05
13	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.931.900,00	-	0,00	2.400.000,00	11,47	4.135.000,00	19,75	20.670.900,00	98,75
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15.386.000,00	2.864.000,00	18,61	2.864.000,00	18,61	2.864.000,00	18,61	12.974.000,00	84,32

Sumbawa Besar, 28 Desember 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa



AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.SI
NIP. 19700828 199211 1 001

REKAPITULASI CAPAIAN HASIL RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SUMBAWA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR DAERAH	TARGET	Target triw 1			Target triw 2			Target triw 3			Target triw 4		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	AKUNTABILITAS KINERJA BAPENDAK	KATEGORI PREDIKAT HASIL EVALUASI AKRP BAPENDAK	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.256.901.438	14.033.734.746	9.417.562.442,64	67,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Program	Anggaran (Rp.)	Target triw 1			Target triw 2			Target triw 3			Target triw 4		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.244.632.237,00	1.963.048.843	1.462.250.111	74,47									
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.576.125,00	334.139.900	80.035.596	23,95									



REKAPITULASI CAPAIAN HASIL RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SUMBAWA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target Iw 1			Target Iw 2			Target Iw 3			Target Iw 4		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	AKUNTABILITAS KINERJA RAPENDA	KATEGORI PREDIKAT HASIL EVALUASI AKIP BAPENDA	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	100	100,00
2	MENINGKATKAN JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.258.581.438	17.033.734.746	9.817.563.443,94	57,10	29.058.211.465,00	18.032.847.527,94	61,9						

	Program	Anggaran (Rp)	Target Iw 1			Target Iw 2								
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%						
	a	b	c	d	e	f	g	h						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.638.476.220,00	1.963.442.843	1.462.250.115	74,47	4.208.974.322	3.580.544.123	85,07						
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.397.710.525,00	894.136.900	86.020.506	23,91	532.928.352	212.614.306	40,02						

Sumbawa Besar, 30 Juni 2023
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Sumbawa


 AGUS MUSTAMIN, S.Sos, M.Si
 NIP. 19700826 199211 1 001



REKAPITULASI CAPAIAN HASIL RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SUMBAWA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target Iw 1			Target Iw 2			Target Iw 3			Target Iw 4		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	AKUNTABILITAS KINERJA BAPENDA	KATEGORI PREDIKAT HASIL EVALUASI AKOP BAPENDA	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	BB	88,62
2	MEMINCATIYKA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	83.554.778.378	14.033.724.745	13.437.363.463,84	67,10	29.358.315.463,00	18.032.847.527,88	61,0	62.073.303.783,00	44.497.545.043,00	71,66			

	Program	Anggaran (Rp.)	Target Iw 1			Target Iw 2			Target Iw 3					
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k			
1	Program Penunjang Groun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Boto	8.508.475.220,00	1.303.448.843	1.462.250.333	75,43	4.208.974.322	3.580.544.631	85,07	8.303.915.609	5.487.010.343	66,03			
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.707.310.325,00	334.138.960	80.075.508	23,53	520.948.332	212.648.306	40,82	280.132.720	325.854.833	57,38			



REKAPITULASI CAPAIAN HASIL RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SUMBAWA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target Iw 1			Target Iw 2			Target Iw 3			Target Iw 4		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	AKUNTABILITAS KINERJA BAPENDA	KATEGORI PREDIKAT HASIL EVALUASI AKIP BAPENDA	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	88	88,00
2	MENINGKATKAN JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.426.018.793	94.033.124.740	9.437.165.963,94	67,10	39.596.211.465,00	18.032.947.577,88	61,0	62.913.385.763,00	44.607.945.041,56	70,86	25.865.557.077,00	65.455.172.190,97	251,34

	Program	Anggaran (Rp.)	Target Iw 1			Target Iw 2			Target Iw 3			Target Iw 4		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Program Pengujiang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.630.476.220,00	1.563.446.843	1.462.250.111	70,47	4.308.976.127	3.580.544.621	83,07	6.301.911.609	5.443.016.343	86,43	8.608.476.220,00	7.580.334.180	88,13
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.307.310.525,00	234.138.960	80.345.556	23,91	500.916.157	212.638.300	40,82	280.117.720	325.854.033	67,89	1.307.310.525,00	1.279.197.673	97,80


 Sumbawa Besar, 30 Desember 2023
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Sumbawa
 AGUSMAN TAMILAS, SPS, M.Si
 NRP. 1570082611002111001

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Program	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat hasil evaluasi AKIP Bapenda		-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.244.632.237,00	1.462.250.115,00	17,74
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	64.256.981.438,00	9.417.163.443,94	14,66	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.578.125,00	80.035.306,00	7,68


 Sumbawa Besar, 31 Maret 2023
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Sumbawa
AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
 NIP. 19700623 199211 1 001

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Program	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat hasil evaluasi AKIP Bapenda	-	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.244.632.237,00	3.560.544.621,00	43,43
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Antar Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	64.256.961.438,00	27.450.010.971,88	42,72	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.578.125,00	212.638.306,00	20,40

Sumbawa Besar, 30 Juni 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa

AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
NIP.19700823 199211 1 001



**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Program	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat hasil evaluasi AKIP Bapenda	-	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.369.632.999,00	5.447.016.343,00	65,08
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Antar Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	83.984.778.378,00	71.947.956.013,56	85,69	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.058.628.125,00	525.854.933,00	49,67

Sumbawa Besar, 30 September 2023



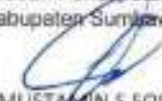
AGUS MUSTAMIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700823 199211 1 001

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Program	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat hasil evaluasi AKIP Bapenda	80,37	79,26	98,62	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.608.476.220,00	7.586.334.060,00	88,13
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Antar Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	102.426.318.793,00	65.415.272.330,97	63,87	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.307.310.625,00	1.279.097.973,00	97,84

Sumbawa Besar, 30 Desember 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa


AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si.
 NIP.19700823 199211 1 001

CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja						Program/Kegiatan	Anggaran				Penanggung Jawab
		uraian	satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi Per Triwulan 1				Rp.	Rencana Aksi Per Triwulan 1			
					APBD								
					Target	Realisasi	%			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18
A	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	A	-	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.244.632.237	1.963.446.843	1.462.250.115	74,47	Kepala Badan
1		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	12	7	6	85,71	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.180.280	35.057.880	0	0,00	Sekretaris
1								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.628.500,00	8.628.500,00	-	-	JF Perencanaan
2								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.599.780,00	6.599.780,00	-	-	JF Perencanaan
3								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.373.600,00	-	-	-	JF Perencanaan
4								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.846.600,00	6.846.600,00	-	-	JF Perencanaan
5								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.299.800,00	-	-	-	JF Perencanaan
6								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000,00	7.983.000,00	-	-	JF Perencanaan
7								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.691.000,00	5.000.000,00	-	-	JF Perencanaan
2		Jumlah Keluaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	16	4	4	100,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.157.932.582	1.626.278.088	1.349.337.741	82,97	Sekretaris
8								Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.133.386.282,00	1.615.390.288,00	1.349.337.741,00	83,53	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
9								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000,00	3.712.000,00	-	-	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
10								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800,00	3.312.800,00	-	-	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
11								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500,00	-	-	-	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

12								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000,00	-	-		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
13								Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000,00	3.863.000,00	-		JF Anaalis Keuangan Pusat dan Daerah
14								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.488.000,00	-	-		JF Anaalis Keuangan Pusat dan Daerah
15								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000,00	-	-		JF Anaalis Keuangan Pusat dan Daerah
3		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	3	2	1	50,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500	3.005.000	-		Sekretaris
16								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	3.005.000,00	-		Subbag Umum dan Kepegawaian
17								Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500,00	-	-		Subbag Umum dan Kepegawaian
4		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok	7	0	-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	Sekretaris
18								Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.200.000,00	2.200.000,00	-		Subbag Umum dan Kepegawaian
5		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	82	20	10	50,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.896.075	47.959.075	19.460.944	40,58	Sekretaris
19								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	4.542.875,00	-		Subbag Umum dan Kepegawaian
20								Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.447.000,00	9.345.000,00	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian
21								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.763.000,00	32.678.000,00	19.460.944,00	59,55	Subbag Umum dan Kepegawaian
								Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200,00	1.393.200,00	-		Subbag Umum dan Kepegawaian
6		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	53	13	4	30,77	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.998.000	152.988.000	78.309.430	51,19	Sekretaris
22								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.538.000,00	3.648.000,00	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian

23								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000,00	30.510.000,00	-	-	Subbag Umum dan Kpegawaian
24								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.600.000,00	11.400.000,00	4.290.000,00	37,63	Subbag Umum dan Kpegawaian
25								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.720.000,00	107.430.000,00	74.019.430,00	68,90	Subbag Umum dan Kpegawaian
7		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		47	11	5	45,45	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.320.800	95.958.800	15.142.000	15,78	Sekretaris
26								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.565.800,00	90.578.800,00	15.142.000,00	16,72	Subbag Umum dan Kpegawaian
27								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.755.000,00	5.380.000,00	-	-	Subbag Umum dan Kpegawaian
28								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	-	-	-	Subbag Umum dan Kpegawaian
B	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUMALH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp.	64.256.981.438,00	14.033.724.748	9.417.163.443,94	67,10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.578.125	334.138.900	80.035.306	23,95	
8	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian Kinerja pendaptaaan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	%	100	25	20	80,00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.042.578.125	334.138.900	80.035.306	23,95	
		Jumlah dokumen pendaptaaan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	Dok	28	7	7	100,00		321.406.825,00	122.108.000,00	21.505.000,00		
29								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	92.913.325,00	4.400.500,00	-	-	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
30								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	82.205.000,00	41.855.000,00	8.400.000,00	20,07	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

31								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18.456.000,00	12.006.000,00	-	-	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
32								Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.168.500,00	15.832.500,00	4.440.000,00	28,04	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
33								Penetapan Wajib Pajak Daerah	90.664.000,00	48.014.000,00	8.665.000,00	18,05	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
	Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Rp.	78.074.934.520	17.061.585.899	8.805.792.874,00	51,84		340.286.900,00	115.946.900,00	36.621.500,00	31,58	
		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD	Dok	156	39	15	38,46		340.286.900,00	115.946.900,00	36.621.500,00	31,58	
34								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	110.021.300,00	33.371.300,00	8.720.000,00	20,14	JF Analisis Kebijakan
35								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	28.710.000,00	17.660.000,00	-	-	JF Analisis Kebijakan
36								Penagihan Pajak Daerah	70.711.500,00	32.186.500,00	27.341.500,00	84,95	Subbid Penagihan Pajak daerah
37								Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.561.100,00	5.820.600,00	-	-	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
38								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	108.283.000,00	26.908.500,00	2.560.000,00	9,51	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
	Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Capaian Kinerja pembinaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan tranfer antar daerah	%	100	25	20	80,00		380.884.400,00	96.084.000,00	21.908.806,00	22,80	

		Jumlah dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	Dok	23	6	3	50,00		380.884.400,00	96.084.000,00	21.908.806,00	22,80	
39								Perencanaan pengelolaan pajak daerah	13.950.000,00	2.908.500,00	-	-	Subbid Perencanaan Pendapatan daerah
40								Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	330.616.000,00	84.186.000,00	19.044.806,00	22,83	JF Analisis Kebijakan
41								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.911.900,00	4.143.500,00	-	-	Subbid Evaluasi dan Pelaporan
42								Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15.386.000,00	4.864.000,00	2.854.000,00	58,88	JF Analisis Kebijakan

Sumbawa Besar, 31 Maret 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa


AGUS MUSTAMIN S. Sos. M.Si
NIP. 19700823 199201 1 001



CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja						Program/Kegiatan	Anggaran				Penanggung Jawab
		uraian	satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi Per Triwulan II				APBD				
					Target	Realisasi	%		Rp.	Rencana Aksi Per Triwulan II			
										Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18
A	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	A	-	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.244.632.237	4.208.974.322	3.880.544.621	85,07	Kepala Badan
1		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	12	8	8	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.180.280	50.815.880	36.104.880	71,05	Sekretaris
1								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.628.500,00	8.628.500,00	8.628.500,00	100,00	JF Perencanaan
2								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.599.780,00	6.599.780,00	6.599.780,00	100,00	JF Perencanaan
3								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.373.600,00	-	-	-	JF Perencanaan
4								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.846.600,00	6.846.600,00	6.846.600,00	100,00	JF Perencanaan
5								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.299.800,00	-	-	-	JF Perencanaan
6								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000,00	13.741.000,00	4.920.000,00	35,81	JF Perencanaan
7								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.691.000,00	15.000.000,00	9.110.000,00	60,73	JF Perencanaan
2		Jumlah Keluaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	16	8	7	87,50	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.157.932.582	3.617.213.567	3.199.885.301	88,46	Sekretaris
8								Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.133.386.282,00	3.606.325.767,00	3.189.447.501,00	88,44	JF Anaalis Keuangan Pusat
9								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000,00	3.712.000,00	3.262.000,00	87,88	JF Anaalis Keuangan Pusat
10								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800,00	3.312.800,00	3.312.800,00	100,00	JF Anaalis Keuangan Pusat dan Daerah
11								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500,00	-	-	-	JF Anaalis Keuangan Pusat dan Daerah

12							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000,00	-	-	-	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
13							Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000,00	3.863.000,00	3.863.000,00	100,00	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
14							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.488.000,00	-	-	-	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
15							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000,00	-	-	-	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
3		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	4	2	2	100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500	3.005.000	3.005.000		Sekretaris
16							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian	
17							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500,00	-	-		Subbag Umum dan Kepegawaian	
4		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok	7	3	3	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	Sekretaris
18							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian	
5		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	82	40	40	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.896.075	90.549.075	67.627.744	74,69	Sekretaris
19							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	4.542.875,00	4.542.875,00	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian	
20							Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.447.000,00	19.157.000,00	8.603.000,00	44,91	Subbag Umum dan Kepegawaian	
21							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.763.000,00	64.706.000,00	52.338.669,00	80,89	Subbag Umum dan Kepegawaian	
							Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200,00	2.143.200,00	2.143.200,00	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian	
6		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	53	26	26	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.998.000	305.778.000	216.281.417	70,73	Sekretaris
22							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.538.000,00	7.098.000,00	6.371.000,00	89,76	Subbag Umum dan Kepegawaian	

23								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000,00	61.020.000,00	26.841.842,00	43,99	Subbag Umum dan Kepegawaian
24								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.600.000,00	22.800.000,00	8.580.000,00	37,63	Subbag Umum dan Kepegawaian
25								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.720.000,00	214.860.000,00	174.488.575,00	81,21	Subbag Umum dan Kepegawaian
7		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		47	23	20	86,98	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.320.800	138.412.800	55.440.279	39,77	Sekretaris
26								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.565.800,00	128.907.800,00	54.782.779,00	42,50	Subbag Umum dan Kepegawaian
27								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.755.000,00	10.505.000,00	657.500,00	6,26	Subbag Umum dan Kepegawaian
28								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian
B	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUALAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp.	64.256.981.438,00	29.558.211.481,48	18.032.847.527,94	61,01	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.578.125	520.928.352	212.638.306	40,82	
8	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian Kinerja pendaptaa, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	%	100	50	100	100	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	321.406.825	191.355.000	66.501.000	34,75	
		Jumlah dokumen pendaptaa, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	Dok	28	14	28	100		321.406.825,00	191.355.000,00	66.501.000,00	34,75	
28								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	92.913.325,00	7.111.500,00	-	-	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak

30								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	82.205.000,00	60.305.000,00	19.065.000,00	31,61	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
31								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18.456.000,00	18.456.000,00	12.076.000,00	65,43	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
32								Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.168.500,00	37.168.500,00	16.970.000,00	45,66	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
33								Penetapan Wajib Pajak Daerah	90.664.000,00	68.314.000,00	18.390.000,00	26,92	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak
	Pendapatan daerah	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Rp.	78.074.934.520	35.914.469.879	30.476.790.784,00	84,86		340.286.900,00	191.524.400,00	106.322.000,00	55,51	
		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD	Dok	156	78	156	100		340.286.900,00	191.524.400,00	106.322.000,00	55,51	
34								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	110.021.300,00	73.521.300,00	36.186.050,00	49,22	JF Analisis Kebijakan
35								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	28.710.000,00	37.960.000,00	10.952.850,00	28,85	JF Analisis Kebijakan
36								Penagihan Pajak Daerah	70.711.500,00	44.811.500,00	42.336.500,00	94,48	Subbid Penagihan Pajak daerah
37								Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.561.100,00	8.323.100,00	7.573.100,00	90,99	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
38								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	108.283.000,00	28.908.500,00	9.273.500,00	34,46	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
	Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Capaian Kinerja pembinaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	%	100	50	50	100		380.884.400,00	138.048.952,00	39.815.306,00	28,84	

		Jumlah dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	Dok.	23	12	10	100		380.884.400,00	138.048.952,00	39.815.306,00	28,84	
39								Perencanaan pengelolaan pajak daerah	13.850.500,00	6.117.116,00	2.906.500,00	47,51	Subsid Perencanaan Pendapatan daerah
40								Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	330.616.000,00	108.588.000,00	31.844.806,00	28,88	JF Analis Kebijakan
41								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.931.900,00	8.957.837,00	2.400.000,00	26,79	Subsid Evaluasi dan Pelaporan
42								Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	13.386.000,00	13.386.000,00	2.864.000,00	21,40	JF Analis Kebijakan



Sumbawa Besar, 31 Juni 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa

AGUS MUHAMMAD AMIN, S.Sos, M.Si

NIP. 19700823-198201-1-001

CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja						Program/Kegiatan	Anggaran				Penanggung Jawab
		uraian	satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi Per Triwulan III				APBD				
									Rp.	Rencana Aksi Per Triwulan III			
					Target	Realisasi	%			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	A				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.369.632.999	6.301.955.609	5.447.016.343	86,43	Kepala Badan
1		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	12	10	10	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.680.280	79.989.280	70.356.280	87,96	Sekretaris
1								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.128.500,00	25.128.500,00	25.128.500,00	100,00	JF Perencanaan
2								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.599.780,00	6.599.780,00	6.599.780,00	100,00	JF Perencanaan
3								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.373.600,00	4.373.600,00	4.373.600,00	100,00	JF Perencanaan
4								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.846.600,00	6.846.600,00	6.846.600,00	100,00	JF Perencanaan
5								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.299.800,00	3.299.800,00	3.299.800,00	100,00	JF Perencanaan
6								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000,00	13.741.000,00	10.678.000,00	77,71	JF Perencanaan
7								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.691.000,00	20.000.000,00	13.430.000,00	67,15	JF Perencanaan
2		Jumlah Keluaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	16	12	12	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.298.983.344	5.419.767.454	4.750.849.430	87,66	Sekretaris
8								Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.274.437.044,00	5.395.221.154,00	4.739.961.630,00	87,85	JF Analisis Keuangan Pusat
9								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000,00	3.712.000,00	3.712.000,00	100,00	JF Analisis Keuangan Pusat
10								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800,00	3.312.800,00	3.312.800,00	100,00	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
11								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500,00	2.114.500,00	-	-	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
12								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000,00	3.714.000,00	-	-	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

13							Pengetolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000,00	3.863.000,00	3.863.000,00	100,00	JF Anaalis Keuangan Pusat dan Daerah
14							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.488.000,00	2.488.000,00	-	-	JF Anaalis Keuangan Pusat dan Daerah
15							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000,00	5.342.000,00	-	-	JF Anaalis Keuangan Pusat dan Daerah
3	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	3	3	2	66,67	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500	3.005.000	3.005.000		Sekretaris
16							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
17							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500,00	-	-		Subbag Umum dan Kepegawaian
4	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok	7	7	7	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-	Sekretaris
18							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		Subbag Umum dan Kepegawaian
5	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	82	60	50	83,33	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.896.075	153.569.075	136.846.165	89,11	Sekretaris
19							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	4.542.875,00	4.542.875,00	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
20							Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.447.000,00	31.102.000,00	15.451.000,00	49,68	Subbag Umum dan Kepegawaian
21							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.763.000,00	115.781.000,00	114.709.090,00	99,07	Subbag Umum dan Kepegawaian
							Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200,00	2.143.200,00	2.143.200,00	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
6	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	53	44	44	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.212.600	460.558.000	373.135.177	81,02	Sekretaris
22							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.538.000,00	12.538.000,00	12.526.000,00	99,90	Subbag Umum dan Kepegawaian
23							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000,00	91.530.000,00	54.281.457,00	59,30	Subbag Umum dan Kepegawaian

24								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.814.600,00	34.200.000,00	26.470.000,00	77,40	Subbag Umum dan Kepegawaian
25								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.720.000,00	322.290.000,00	279.857.720,00	86,83	Subbag Umum dan Kepegawaian
7		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		47	30	16	53,33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.556.200	182.866.800	110.624.291	60,49	Sekretaris
26								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	182.801.200,00	167.236.800,00	109.785.971,00	65,65	Subbag Umum dan Kepegawaian
27								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.755.000,00	15.630.000,00	838.320,00	5,36	Subbag Umum dan Kepegawaian
28								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Lainnya	20.000.000,00	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian
B	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp.	83.964.778.378,00	62.873.583.783,50	44.497.945.041,68	70,66	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.058.628.125	790.332.720	525.854.933	204	
8	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian Kinerja pendaptan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	%	100	75	100	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	327.931.825	224.655.000	172.139.000	76,62	
		Jumlah dokumen pendaptan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	Dok	28	21	21	100	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	327.931.825,00	224.655.000,00	172.139.000,00	76,62	
29								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	92.913.325,00	7.111.500,00	5.160.000,00	72,56	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak
30								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	88.730.000,00	71.255.000,00	53.763.000,00	75,45	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

31								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18.456.000,00	18.456.000,00	17.336.000,00	93,93	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
32								Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.168.500,00	37.168.500,00	25.490.000,00	68,58	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
33								Penetapan Wajib Pajak Daerah	90.664.000,00	90.664.000,00	70.390.000,00	77,64	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak
	Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Rp.	78.074.934.520	104.099.912.693	30.476.790.784,54	29,28	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	346.811.900,00	303.439.400,00	192.686.500,00	63,50	
		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD	Dok	156	104	104	100	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	346.811.900,00	303.439.400,00	192.686.500,00	63,50	
34								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	101.046.300,00	85.521.300,00	50.856.050,00	59,47	JF Analisis Kebijakan
35								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	28.710.000,00	37.980.000,00	10.952.850,00	28,85	JF Analisis Kebijakan
36								Penagihan Pajak Daerah	107.768.000,00	81.869.000,00	80.801.000,00	98,70	Subbid Penagihan Pajak daerah
37								Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.561.100,00	15.292.100,00	7.573.100,00	49,52	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
38								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	86.726.500,00	82.797.000,00	42.503.500,00	51,33	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
	Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Capaian Kinerja pembinaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan tranfer antar daerah	%	100	75	75	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	383.884.400,00	252.238.320,00	161.029.433,00	63,84	
		analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	Dok	23	16	16	100	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	383.884.400,00	252.238.320,00	161.029.433,00	63,84	

39							Perencanaan pengelolaan pajak daerah	13.950.500,00	10.681.275,00	7.476.500,00	70,86	Subbid Perencanaan Pendapatan daerah
40							Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	333.616.000,00	210.615.000,00	146.553.933,00	69,58	JF Analis Kebijakan
41							Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.911.900,00	15.656.045,00	4.135.000,00	26,41	Subbid Evaluasi dan Pelaporan
42							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15.386.000,00	15.386.000,00	2.864.000,00	18,61	JF Analis Kebijakan

Sumbawa Besar, 30 September 2023
 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa


 AGUS MUSTAMIN S. Soe M.Si
 NIP. 19700823 199201 1 001



CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja						Program/Kegiatan	Anggaran				Penanggung Jawab
		uraian	satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi Per Triwulan IV				Rp.	APBD			
					Rencana Aksi Per Triwulan IV								
					Target	Realisasi	%			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	A	A	BB		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.508.476.220	8.508.476.220	7.588.334.080	88,13	Kepala Badan
1		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	12	12	12	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.813.280	96.813.280	93.578.280	96,66	Sekretaris
1								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.128.500,00	25.128.500,00	25.128.500,00	100,00	JF Perencanaan
2								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.599.780,00	6.599.780,00	6.599.780,00	100,00	JF Perencanaan
3								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.373.600,00	4.373.600,00	4.373.600,00	100,00	JF Perencanaan
4								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.846.600,00	6.846.600,00	6.846.600,00	100,00	JF Perencanaan
5								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.299.800,00	3.299.800,00	3.299.800,00	100,00	JF Perencanaan
6								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000,00	13.741.000,00	13.738.000,00	99,98	JF Perencanaan
7								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.824.000,00	36.824.000,00	33.592.000,00	91,22	JF Perencanaan
2		Jumlah Keluaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	16	16	16	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.450.150.565	7.450.150.565	6.542.979.412	87,82	Sekretaris
8								Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.425.604.265,00	7.425.604.265,00	6.518.354.112,00	87,78	JF Analis Keuangan Pusat
9								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000,00	3.712.000,00	3.712.000,00	100,00	JF Analis Keuangan Pusat
10								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800,00	3.312.800,00	3.312.800,00	100,00	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
11								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500,00	2.114.500,00	2.093.500,00	99,01	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
12								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000,00	3.714.000,00	3.714.000,00	100,00	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah

13								Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000,00	3.863.000,00	3.863.000,00	100,00	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
14								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.488.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	100,00	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
15								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000,00	5.342.000,00	5.342.000,00	100,00	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
3		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	4	4	4	100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500	4.104.500	4.104.500		Sekretaris
16								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
17								Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500,00	1.099.500,00	1.099.500,00	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
4		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok	7	7	7	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	
18								Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
5		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	82	82	82	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.419.075	225.419.075	199.648.938	88,57	Sekretaris
19								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	4.542.875,00	4.542.872,00	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
20								Fasilitas Kunjungan Tamu	40.447.000,00	40.447.000,00	23.914.000,00	59,12	Subbag Umum dan Kepegawaian
21								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.286.000,00	178.286.000,00	169.048.866,00	94,82	Subbag Umum dan Kepegawaian
								Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200,00	2.143.200,00	2.143.200,00	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
6		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	53	53	53	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.992.600	603.992.600	541.960.401	89,71	Sekretaris
22								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.538.000,00	12.538.000,00	12.526.000,00	99,90	Subbag Umum dan Kepegawaian
23								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000,00	110.140.000,00	85.267.821,00	77,42	Subbag Umum dan Kepegawaian

24								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.594.600,00	51.594.600,00	51.340.000,00	99,51	Subbag Umum dan Kepegawaian
25								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.720.000,00	429.720.000,00	382.726.580,00	91,39	Subbag Umum dan Kepegawaian
7		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		47	47	47	100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.796.200	225.796.200	202.062.529	89,49	Sekretaris
26								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.801.200,00	182.801.200,00	166.502.189,00	91,08	Subbag Umum dan Kepegawaian
27								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.755.000,00	20.755.000,00	14.139.940,00	68,12	Subbag Umum dan Kepegawaian
28								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.240.000,00	22.240.000,00	21.421.000,00	-	Subbag Umum dan Kepegawaian
B	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp.	102.428.318.793,00	25.985.557.077,78	65.413.536.830,97	251,73	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.307.310.525	1.307.310.525	1.279.197.973	97,86	
8	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian Kinerja pendaptaan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	%	100	100	100	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	378.017.825	378.017.825	374.130.000	98,97	
		Jumlah dokumen pendaptaan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	Dok	28	28	28	100	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	378.017.825	378.017.825	374.130.000	98,97	
29								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	126.279.325,00	126.279.325,00	125.958.500,00	99,74	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
30								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	99.450.000,00	99.450.000,00	96.303.000,00	96,84	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

31								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18.456.000,00	18.456.000,00	18.236.000,00	98,81	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
32								Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.168.500,00	37.168.500,00	37.106.500,00	99,83	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
33								Penetapan Wajib Pajak Daerah	96.564.000,00	96.654.000,00	98.528.000,00	99,86	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak
	Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Rp.	78.074.934.520	78.074.934.520	81.565.915.054,80	78,65	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	366.918.900,00	366.918.900,00	361.530.500,00	98,53	
		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD	Dok	156	156	156	100	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	366.918.900	366.918.900	361.530.500	98,53	
34								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	101.048.300,00	101.048.300,00	99.674.050,00	98,64	JF Analisis Kebijakan
35								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	28.710.000,00	28.710.000,00	28.417.850,00	98,98	JF Analisis Kebijakan
36								Penagihan Pajak Daerah	127.873.000,00	127.873.000,00	127.206.000,00	99,48	Subbid Penagihan Pajak daerah
37								Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.561.100,00	22.561.100,00	22.129.100,00	98,09	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
38								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	86.726.500,00	86.726.500,00	84.103.500,00	96,98	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
	Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Capaian Kinerja pembinaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan tranfer antar daerah	%	100	100	100	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	562.373.800,00	562.373.800,00	543.537.473,00	96,65	
		Jumlah dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	Dok	23	23	23	100	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	562.373.800	562.373.800	543.537.473	96,65	

39							Perencanaan pengelolaan pajak daerah	13.950.500,00	13.950.500,00	12.905.500,00	92,52	Subbid Perencanaan Pendapatan daerah
40							Audit dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	512.105.400,00	512.105.400,00	496.985.073,00	97,05	JF Analisis Kebijakan
41							Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.931.900,00	20.931.900,00	20.670.900,00	98,75	Subbid Evaluasi dan Pelaporan
42							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15.386.000,00	15.386.000,00	12.974.000,00	84,32	JF Analisis Kebijakan

Sumbawa Besar, 30 Desember 2023
 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa


 AGUS MUSTAMIN S. Ses. M.Si
 NIP. 19700323 199201 1 001



CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% REALISASI KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
						(RP)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	AKUNTABILITAS KINERJA BAPENDA	KATEGORI PREDIKAT HASIL EVALUASI AKIP BAPENDA								
		Nilai SAKIP Bapenda	A	80,37	79,26	98,62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	8.608.476.220,00	7.586.334.060,00	88,13
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	dok	12	12	100,00	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.813.280,00	93.578.280,00	96,66
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	2	100,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.128.500,00	25.128.500,00	100,00
		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	100,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.599.780,00	6.599.780,00	100,00
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	2	2	100,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4.373.600,00	4.373.600,00	100,00
		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	100,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	6.846.600,00	6.846.600,00	100,00
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	100,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	3.299.800,00	3.299.800,00	100,00
		Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	Laporan	3	3	100,00	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000,00	13.738.000,00	99,98
		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	3	100,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.824.000,00	33.592.000,00	91,22
		Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	Dok	16	16	100,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.450.160.565,00	6.542.879.412,00	87,82
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bln	55	55	100,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.425.604.265,00	6.518.354.112,00	87,78
		Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok	1	1	100,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000,00	3.712.000,00	100,00
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dok	1	1	100,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800,00	3.312.800,00	100,00
		Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntanst SKPD	Dok	1	1	100,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500,00	2.093.500,00	99,01

	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2	2	100,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000,00	3.714.000,00	100,00
	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	dok	1	1	100,00	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000,00	3.863.000,00	100,00
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	8	8	100,00	Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.488.000,00	2.488.000,00	100,00
	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	dok	1	1	100,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000,00	5.342.000,00	100,00
	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun	Dok	3	3	100,00	Administrasi Barang Milik Daerah	4.104.500,00	4.104.500,00	100,00
	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dok	1	1	100,00	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	3.005.000,00	3.005.000,00	100,00
	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100,00	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500,00	1.099.500,00	100,00
	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	Dok	7	7	100,00	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	dok	7	7	100,00	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	Jumlah DOKumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun		82	82	100,00	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	225.419.075,00	198.648.938,00	88,67
	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	4.542.875,00	4.542.872,00	100,00
	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	32	32	100,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.447.000,00	23.914.000,00	59,12
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	36	36	100,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.286.000,00	169.048.868,00	94,82
	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dok	3	3	100,00	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200,00	2.143.200,00	100,00
	Jumlah DOKumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	Dok	53	53	100,00	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.992.600,00	541.860.401,00	89,71
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	6	6	100,00	Penyediaan jasa Surat Menyurat	12.538.000,00	12.526.000,00	99,90
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	4	4	100,00	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000,00	85.287.821,00	77,42
	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	35	35	100,00	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.594.600,00	51.340.000,00	99,51
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	8	8	100,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.720.000,00	392.726.580,00	91,39

		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	47	47	100,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.796.200,00	202.052.529,00	89,49
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	16	16	100,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	182.801.200,00	166.502.189,00	91,08
		Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	unit	30	30	100,00	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	20.755.000,00	14.139.340,00	68,12
		Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehab	unit	1	1	100,00	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	22.240.000,00	21.421.000,00	96,32
MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp.	102.426.318.793,00	65.413.536.830,97	63,86		1.307.310.525,00	1.279.197.973,00	97,85
		<i>Persentase Capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah</i>	%	100	100	100,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	378.017.525,00	374.130.000,00	98,97
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah</i>	Dok	28	28	100,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	378.017.525,00	374.130.000,00	98,97
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	unit	5	5	100,00	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	126.279.325,00	125.956.500,00	99,74
		Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	laporan	12	12	100,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	99.450.000,00	96.303.000,00	96,84
		Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	laporan	2	2	100,00	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18.456.000,00	18.236.000,00	98,81
		Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJO Pnya	obyek pajak	241.353	241.353	100,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.168.500,00	37.106.500,00	99,83
		Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	dok	9	9	100,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	96.664.000,00	96.528.000,00	99,86
		<i>Jumlah Realisasi Pajak Daerah</i>	%	78.074.934.520,00	47.339.956.470,54	60,63	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	386.918.900,00	381.530.500,00	98,53
		<i>Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD</i>	%	156	156	100	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	386.918.900,00	381.530.500,00	98,53
		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	laporan	6	6	100,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	101.048.300,00	99.674.050,00	98,64
		Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	layanan	121	121	100,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	28.710.000,00	28.417.850,00	98,98

	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	dok	2	2	100,00	Penagihan Pajak daerah	127.873.000,00	127.205.000,00	99,48
	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	dok	25	25	100,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.361.100,00	22.129.100,00	98,09
	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dok	2	2	100,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	66.726.500,00	64.903.500,00	96,98
	<i>Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Obyek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer antar daerah.</i>	%	100	100	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	562.373.800,00	543.537.473,00	96,65
	<i>Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah</i>	Dok	23	23	100	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	562.373.800,00	543.537.473,00	96,65
	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dok	2	2	100,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	11.990.500,00	12.906.500,00	92,62
	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	dok	5	5	100,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kebijakan Pajak daerah	512.105.400,00	496.986.073,00	97,05
	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penditian dan verifikasi	dok	12	12	100,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.931.900,00	20.670.900,00	98,75
	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	4	4	100,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.396.000,00	12.974.000,00	84,32



CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI					
		MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.608.476.220,00			7.586.334.083,00	88,13				
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.813.280,00	12	12	93.578.280,00	96,66	12	100	12	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.128.500,00	2	1	25.128.500,00	100,00	2	100	1	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.599.780,00	1	1	6.599.780,00	100,00	1	100	1	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	4.373.600,00	1	1	4.373.600,00	100,00	1	100	1	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.846.600,00	1	1	6.846.600,00	100,00	1	100	1	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	3.299.800,00	1	1	3.299.800,00	100,00	1	100	1	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000,00	3	1	13.738.000,00	99,98	3	100	1	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.824.000,00	3	1	33.592.000,00	91,22	3	100	1	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.450.150.585,00	16	16	6.542.879.412,00	87,82	16	100	16,00	100
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.425.604.265,00	55	55	6.518.354.112,00	87,78	55	100	55	100
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000,00	1	1	3.712.000,00	100,00	1	100	1	100
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800,00	1	1	3.312.800,00	100,00	1	100	1	100
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500,00	1	1	2.093.500,00	99,01	1	100	1	100
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000,00	2	2	3.714.000,00	100,00	2	100	2	100
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000,00	1	1	3.863.000,00	100,00	1	100	1	100
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.488.000,00	8	8	2.488.000,00	100,00	8	100	8	100
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000,00	1	1	5.342.000,00	100,00	1	100	1	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500,00	3	3	4.104.500,00	100,00	3	100	3	100
16	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	1	1	3.005.000,00	100,00	1	100	1	100
17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	1.099.500,00	2	2	1.099.500,00	100,00	2	100	2	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	7	7	2.200.000,00	100,00	7	100	7	100
18	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2.200.000,00	7	7	2.200.000,00	100,00	7	100	7	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.419.075,00	82	82	199.648.941,00	88,57	82	100	82	100

19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	1	1	4.542.875,00	100,00	1	100	1	100
	Fasilitas Kunjungan Tamu	40.447.000,00	32	32	23.914.000,00	59,12	32	100	32	100
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.286.000,00	36	36	169.048.866,00	94,82	36	100	36	100
21	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200,00	3	3	2.143.200,00	100,00	3	100	3	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.992.600,00	53	53	541.860.401,00	89,71	53	100	53	100
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.538.000,00	6	6	12.526.000,00	99,90	6	100	6	100
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000,00	4	4	85.287.821,00	77,42	4	100	4	100
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.594.600,00	35	35	51.340.000,00	99,51	35	100	35	100,00
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.720.000,00	8	8	392.726.580,00	91,39	8	100	8	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	225.796.200,00	47	47	202.062.529,00	89,49	47	100	47	100
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.801.200,00	16	16	166.502.189,00	91,08	16	100	16	100
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.755.000,00	30	30	14.139.340,00	68,12	30	100	30	100,00
28	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.240.000,00	1	1	21.421.000,00	96,32	1	100	1	100
8	Program pengelolaan Pendapatan daerah	378.017.825,00			374.130.000,00	98,97				
8	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	378.017.825,00	28	28	374.130.000,00	98,97	28	100	28	100
29	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	125.279.325,00	5	5	125.955.500,00	99,74	5	100	5	100
30	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	99.450.000,00	12	12	96.303.000,00	96,84	12	100	12	100
31	Pengelolaan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	18.456.000,00	2	2	18.236.000,00	98,81	2	100	2	100
32	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.168.500,00	241353	241353	37.106.500,00	99,83	241353	100	241353	100
33	Penetapan Wajib Pajak Daerah	96.664.000,00	9	9	96.528.000,00	99,86	9	100	9	100
	Program pengelolaan Pendapatan daerah									
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	366.918.900,00	156	156	361.430.500,00	98,50	156	100	156	100
34	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	101.048.300,00	6	6	99.574.050,00	98,54	6	100	6	100
35	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	28.710.000,00	121	121	28.417.850,00	98,98	121	100	121	100
36	Penagihan Pajak Daerah	127.873.000,00	2	2	127.206.000,00	99,48	2	100	2	100
37	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.561.100,00	25	25	22.129.100,00	98,09	25	100	25	100

38	Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	86.725.500,00	2	2	84.103.500,00	96,98	2	100	2	100
	Program pengelolaan Pendapatan daerah									
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	562.373.800,00	23	23	543.537.473,00	96,65	23	100	223	969,565
39	Perencanaan Pengelolaan Pajak daerah	13.950.500,00	2	2	12.906.500,00	92,52	2	100	2	100
40	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	512.105.400,00	5	5	496.986.073,00	97,05	5	100	5	100
41	Penelitian dan Verifikasi Data Piaporan Pajak daerah	20.911.900,00	12	12	20.670.900,00	98,75	12	100	12	100
42	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	15.386.000,00	4	4	12.974.000,00	84,32	4	100	4	100

Sumbawa Besar, 30 Desember 2023



MATRIK HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAEGET	REALISASI	NILAI CAPAI AN
1	2	3		4	5	6	7
1	PROGARAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Bapenda	80,37	8.608.476.220	7.586.334.063	88,13
A	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	12	96.813.280	93.578.280	96,66
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	25.128.500	25.128.500	100,00
		keluaran	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Dok	2	2	100,00
		Hasil	dokumen Renstra dan Renja	Dok	2	2	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	6.599.780	6.599.780	100,00
		keluaran	Jumlah dokumen RKA SKPD	Dok	1	1	100,00
		Hasil	Dokumen RKA SKPD	Dok	1	1	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	4.373.600	4.373.600	100,00
		keluaran	Jumlah dokumen RKAP SKPD	Dok	1	1	100,00
		Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	Dok	1	1	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	%	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	6.846.600	6.846.600	100,00
		keluaran	Jumlah dokumen DPA SKPD	Dok	1	1	100,00
		Hasil	Dokumen DPA SKPD	Dok	1	1	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	3.299.800	3.299.800	100,00
		keluaran	Jumlah dokumen DPPA SKPD	Dok	1	1	100,00
		Hasil	Dokumen DPPA SKPD	Dok	1	1	100,00

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	13.741.000	13.738.000	99,98
		keluaran	Jumlah dokumen LKJIP	Lap	3	3	100,00
		Hasil	laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD , Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja ,ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	Lap	3	3	100,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	36.824.000	33.592.000	91,22
		keluaran	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD dan LPPD	Lap	3	3	100,00
		Hasil	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Lap	3	3	100,00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah keluaran pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah yang di rencanakan	16	7.450.150.565	6.542.879.412	87,82
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	7.425.604.265	6.518.354.112	87,78
		keluaran	Daftar Gaji ASN	org/bln	55	58	105,45
		Hasil	orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	org/bln	55	55	100,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	3.712.000	3.712.000	100,00
		keluaran	Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1	1	100,00
		Hasil	dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dok	1	1	100,00
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	3.312.800	3.312.800	100,00
		keluaran	Laporan Administrasi Keuangan SKPD	Dok	1	1	100,00
		Hasil	dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dok	1	1	100,00

4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	2.114.500	2.093.500	99,01
		keluaran	Laporan Akuntansi SKPD	Dok	1	1	100,00
		Hasil	dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dok	1	1	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	3.714.000	3.714.000	100,00
		keluaran	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	2	2	100,00
		Hasil	laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	lap	2	2	100,00
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	3.863.000	3.863.000	100,00
		keluaran	Laporan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dok	1	1	100,00
		Hasil	dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dok	1	1	100,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	2.488.000	2.488.000	100,00
		keluaran	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Lap	8	8	100,00
		Hasil	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Lap	8	8	100,00
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	5.342.000	5.342.000	100,00
		keluaran	laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	1	1	100,00
		Hasil	dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasai anggaran	Dok	1	1	100,00

C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumentasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	3	4.104.500	4.104.500	100,00
1	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	3.005.000	3.005.000	100,00
		keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dok	1	1	100,00
		Hasil	Dokumen Rencana Kebutuhan barang Milik Daerah	Dok	1	1	100,00
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	1.099.500	1.099.500	100,00
		keluaran	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	lap	2	2	100,00
		Hasil	Dokumen hasil Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	lap	2	2	100,00
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	7	2.200.000	2.200.000	100,00
1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	2.200.000	2.200.000	100,00
		keluaran	laporan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Dok	7	7	100,00
		Hasil	dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Dok	7	7	100,00
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	82	225.419.075	199.648.941	88,57
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	4.542.875	4.542.875	100,00
		keluaran	Jumlah Komponen Instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor yang diadakan	Paket	1	1	100,00
		Hasil	paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100,00
2	Fasilitas Kunjungan Tamu	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	40.447.000	23.914.000	59,12

		keluaran	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Lap	32	32	100,00
		Hasil	laporan fasilitasi kunjungan tamu	Lap	32	32	100,00
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	178.286.000	169.048.866	94,82
		keluaran	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Lap	36	36	100,00
		Hasil	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	36	36	100,00
4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	2.143.200	2.143.200	100,00
		keluaran	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dok	3	3	100,00
		Hasil	Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dok	3	3	100,00
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	53	603.992.600	541.860.401	89,71
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	12.538.000	12.526.000	99,90
		keluaran	Jumlah Surat (masuk/keluar)	lap	6	6	100,00
		Hasil	laporan penyediaan jasa surat menyurat	lap	6	6	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	110.140.000	85.267.821	77,42
		keluaran	Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	lap	4	4	100,00
		Hasil	laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	lap	4	4	100,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	51.594.600	51.340.000	99,51

		keluaran	Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	lap	35	35	100,00
		Hasil	laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	lap	35	35	100,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	429.720.000	392.726.580	91,38
		keluaran	Jumlah pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	lap	8	8	100,00
		Hasil	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	lap	8	8	100,00
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	47	225.796.200	202.062.529	89,49
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	182.801.200	166.502.189	91,08
		keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	unit	16	16	100,00
		Hasil	Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	16	16	100,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	20.755.000	14.139.340	68,12
		keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	unit	30	30	100,00
		Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	30	30	100,00
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kkantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Program	Nilai AKIP Bapenda	Nilai	80,37	79,96	99,49
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	22.240.000	21.421.000	96,32

		keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	unit	1	1	100,00
		Hasil	saranan dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	unit	1	1	100,00
2	Program pengelolaan Pendapatan daerah		Persentase Capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Op/SP?WP Pajak daerah		378.017.825	374.130.000	98,97
H	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah		Jumlah Dokumen Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Op/SP?WP Pajak daerah		378.017.825	374.130.000	98,97

1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Op/SP?WP Pajak daerah	%	100	100,00	100,00
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	126.279.325	125.956.500	99,74
		keluaran	Jumlah Sarpras tersedia	unit	5	5	100,00
		Hasil	Sarana dan Prasarana pengelolaan pajak daerah yang dikelola	unit	5	5	100,00
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Op/SP?WP Pajak daerah	%	100	100,00	100,00
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	99.450.000	96.303.000	96,84
		keluaran	Jumlah Wajib Pajak	Lap	12	12	100,00
		Hasil	laporan bulanan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	Lap	12	12	100,00
3	Pengelolaan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Op/SP?WP Pajak daerah	%	100	100,00	100,00
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	18.456.000	18.236.000	98,81
		keluaran	Aplikasi	Lap	2	2	100,00
		Hasil	laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Lap	2	2	100,00

4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Op/SP?WP Pajak daerah	%	100	100,00	100,00
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	37.168.500	37.106.500	99,83
		keluaran	Dokumen Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	OP	241.353	241.353	100,00
		Hasil	Objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	OP	241.353	241.353	100,00
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Op/SP?WP Pajak daerah	%	100	100,00	100,00
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	96.664.000	96.528.000	99,86
		keluaran	Jumlah Objek Pajak	Dok	9	9	100,00
		Hasil	Dokumen penetapan pajak daerah	Dok	9	9	100,00
	Program pengelolaan Pendapatan daerah		Jumlah Realisasi Pajak daerah	Rp.	78.074.934.520	45.368.887.046,54	58,11
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD		366.918.900	361.430.500	98,50
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Capaian Program	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Rp.	78.074.934.520	61.565.915.054,60	78,85
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	101.048.300	99.574.050	98,54
		keluaran	Jumlah Wajib Pajak yang tersosialisasi pajak daerah	lap	6	6	100,00
		Hasil	laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	lap	6	6	100,00
2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Capaian Program	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Rp.	78.074.934.520	61.565.915.054,60	78,85
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	28.710.000	28.417.850	98,98
		keluaran	Jumlah Wajib pajak yang dibina	layanan	121	121	100,00
		Hasil	layanan dan konsultasi pajak daerah	layanan	121	121	100,00
3	Penagihan Pajak Daerah	Capaian Program	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Rp.	78.074.934.520	61.565.915.054,60	78,85
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	127.873.000	127.206.000	99,48
		keluaran	Jumlah Obyek Penagihan	Dok	2	2	100,00
		Hasil	hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dok	2	2	100,00

4	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Capaian Program	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Rp.	78.074.934.520	61.565.915.054,60	78,85
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	22.561.100	22.129.100	98,09
		keluaran	Tindak Lanjut Hasil Temuan	Dok	25	25	100,00
		Hasil	dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dok	25	25	100,00
5	Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Capaian Program	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Rp.	78.074.934.520	61.565.915.054,60	78,85
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	86.726.500	84.103.500	96,98
		keluaran	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan	Dok	2	2	100,00
		Hasil	dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dok	2	2	100,00
	Program pengelolaan Pendapatan daerah		Persentase Capaian kinerja pembinaan dan pengawasan Obyek retribusi Daerah, Pajak daerah dan Transfer antar Daerah	%	562.373.800	543.537.473	96,65
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah		Jumlah Dokumen analis kebijakan pengelolaa da pengawasan Obyek retribusi Daerah, Pajak daerah dan Transfer antar Daerah		562.373.800	543.537.473	96,65
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak daerah	Capaian Program	Persentase Capaian kinerja pembinaan dan pengawasan Obyek retribusi Daerah, Pajak daerah dan Transfer antar Daerah	%	100	100	100,00
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	13.950.500	12.906.500	92,52
		keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	2	2	100,00
		Hasil	dokumen hasil Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dok	2	2	100,00
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Capaian Program	Persentase Capaian kinerja pembinaan dan pengawasan Obyek retribusi Daerah, Pajak daerah dan Transfer antar Daerah	%	100	100	100,00
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	512.105.400	496.986.073	97,05
		keluaran	Jumlah Dokumen kebijakan Pajak daerah	Dok	5	5	100,00
		Hasil	dokumen hasil analisa pajak daerah, pengembangan pajak daerah dan kebijakan paajak daerah	Dok	5	5	100,00

10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Capaian Program	Persentase Capaian kinerja pembinaan dan pengawasan Obyek retribusi Daerah, Pajak daerah dan Transfer antar Daerah	%	100	100	100,00
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	20.931.900	20.670.900	98,75
		keluaran	Jumlah dokumen verifikasi	Dok	12	12	100,00
		Hasil	dokumen hasil penelitian, verifikasi data dan pelaporan pajak daerah	Dok	12	12	100,00
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Capaian Program	Persentase Capaian kinerja pembinaan dan pengawasan Obyek retribusi Daerah, Pajak daerah dan Transfer antar Daerah	%	100	100	100,00
		Masukan	Jumlah anggaran yang dibutuhkan	Rp	15.386.000	12.974.000	84,32
		keluaran	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lap	4	4	100,00
		Hasil	laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Lap	4	4	100,00

Sumbawa Besar, 30 Desember 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa

 AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
NIP.19700823 199211 1 001

REALISASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TRIWULAN I TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGI	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6
1	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat Hasil hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	A	-	-
2	Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	64.256.981.438,00	9.417.163.443,94	14,66

NO	PROGRAM	ANGGARAN	Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.244.632.237,00	1.963.346.843	1.462.250.115	74,48
1	Pertencanaan, Penganggaaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.180.280,00	35.057.880	0	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.157.932.582,00	1.626.178.088	1.349.337.741	82,98
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500,00	3.005.000	0	0,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000	0	0,00
5	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	175.896.075,00	47.959.075	19.460.944	40,58
6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	584.998.000,00	152.988.000	78.309.430	51,19
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.320.800,00	95.958.800	15.142.000	15,78
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.578.125,00	334.138.900	80.035.306	23,95
8	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.578.125,00	334.138.900	80.035.306	23,95

Sumbawa Besar, 31 Maret 2023

Kepala Badan Pendapatan daerah

Kabupaten Sumbawa


AGUS MUSTAMIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700826 199211 1 001

REALISASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TRIWULAN II TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGI	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6
1	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat Hasil hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	A	-	-
2	Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	64.256.981.438,00	18.032.847.527,94	28,06

NO	PROGRAM	ANGGARAN	Target	Realisasi	capaian
			4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.244.632.237,00	4.208.974.322	3.580.544.621	85,07
1	Pertencanaan, Penganggaaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.180.280,00	50.815.880	36.104.880	71,05
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.157.932.582,00	3.617.213.567	3.199.885.301	88,46
3	Administrasi Barang Milik Daerah	4.104.500,00	3.005.000	3.005.000	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000	2.200.000	100,00
5	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	175.896.075,00	90.549.075	67.627.744	74,69
6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	584.998.000,00	305.778.000	216.281.417	70,73
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.320.800,00	139.412.800	55.440.279	39,77
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.578.125,00	520.928.352	212.638.306	40,82
8	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.578.125,00	520.928.352	212.638.306	40,82

Sumbawa Besar, 30 Juni 2023
Kepala Badan Pendapatan daerah
Kabupaten Sumbawa

AGUS MUSTAMIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700826 199211 1 001

REALISASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TRIWULAN III TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGI	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1		3	4	5	6
1	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat Hasil hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	A	-	-
2	Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	83.964.778.378,00	44.497.945.041,68	53,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	Target	Realisasi	capaian
			4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.369.632.999,00	6.301.955.609	5.440.816.343	86,34
1	Pertencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.680.280,00	79.989.280	70.356.280	87,96
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.298.983.344,00	5.419.767.454	4.750.649.430	87,65
3	Administrasi Barang Milik Daerah	4.104.500,00	3.005.000	3.005.000	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000	2.200.000	100,00
5	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	175.896.075,00	153.569.075	130.846.165	85,20
6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	575.212.600,00	460.558.000	373.135.177	81,02
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.556.200,00	182.866.800	110.624.291	60,49
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.058.628.125,00	780.332.720	525.854.933	67,39
8	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.058.628.125,00	780.332.720	525.854.933	67,39

Sumbawa Besar, 30 September 2023
Kepala Badan Pendapatan daerah
Kabupaten Sumbawa

AGUS MUSTAMIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700826 199211 1 001

REALISASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TRIWULAN IV TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGI	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1		3	4	5	6
1	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat Hasil hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	A	BB	98,62
2	Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	102.426.318.793,00	65.415.272.330,97	63,87

NO	PROGRAM	ANGGARAN	Target	Realisasi	capaian
			4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.608.476.220,00	8.608.476.220	7.586.334.060	88,13
1	Pertencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.813.280,00	96.813.280,00	93.578.280	96,66
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.450.150.565,00	7.450.150.565,00	6.542.879.412	87,82
3	Administrasi Barang Milik Daerah	4.104.500,00	4.104.500,00	4.104.500	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000	100,00
5	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	225.419.075,00	225.419.075,00	199.648.938	88,57
6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	603.992.600,00	603.992.600,00	541.860.401	89,71
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.796.200,00	225.796.200,00	202.062.529	89,49
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.307.310.525,00	1.307.310.525	1.279.097.973	97,84
8	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.307.310.525,00	1.307.310.525,00	1.279.097.973	97,84

Sumbawa Besar, 30 Desember 2023
Kepala Badan Pendapatan daerah
Kabupaten Sumbawa


AGUS MUSTAMIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700826 199211 1 001

DATA CAPAI KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Bapenda	A	88	88	Program Penguji Urusan Pemerintahan daerah/Kota	Nilai AKIP Bapenda	80,37	79,26	98,62	8.608.476.220	7.586.334.060	88,13
2	Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	102.426.326.790,00	85.415.272.330,97	83,87	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/PP pajak Daerah	100	100	100,00	328.017.825	374.130.000	98,97
							Jumlah Realisasi Pajak Daerah	78.074.034.520,00	47.338.956.470,54	60,63	866.918.900	361.430.500	98,50
							Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Objek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer antar Daerah	100	100	100,00	562.873.800	543.537.473	96,55

Sumbawa Besar, 30 Desember 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa


AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
NRP. 19790828 199211 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Hasanuddin Nomor 1 Telp. (0371) 2620786 Sumbawa Besar

LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TRIWULAN I TAHUN 2023

Kegiatan Monev Triwulan I dilakukan dengan cara menyampaikan formulir atau format yang harus diisi oleh bidang - bidang untuk kemudian dikompilasi dalam bentuk laporan kinerja triwulanan, Laporan fisik keuangan dan matrik rencana kerja dan capaian kinerja

Adapun pelaksanaan pengumpulan dan kompilasi data perkembangan kinerja keuangan dan pemantauan capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada Triwulan I dilaksanakan pada Minggu ke I dan Minggu ke II

Ringkasan hasil Kompilasi data terkait perkembangan capaian kinerja program dan kegiatan serta kinerja keuangan baik dari sisi pendapatan maupun belanja adalah sebagai berikut :

Penerimaan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 per 31 Maret 2023

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	(%)
A	PENDAPATAN DAERAH	158.419.146.523,00	15.767.286.092,94	9,95
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.256.981.438,00	9.417.163.443,94	14,66
1	Pendapatan Pajak Daerah	42.389.125.000,00	8.805.792.874,00	20,77
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.342.856.438,00	-	0,00
4	Lain-lain Pendapatn Asli Daerah yang Sah	9.525.000.000,00	611.370.569,94	6,42
2	PENDAPATAN TRANSFER	94.162.165.085,00	6.350.122.649,00	6,74
2	Pendapatan Transfer antar Daerah	94.162.165.085,00	6.350.122.649,00	6,74

Progres Laporan Fiskeu Program dan Kegiatan dari masing - masing bidang dan Sekretariat
per 31 Maret 2023

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		KET
			KEUANGAN		
			Rp.	%	
1	SEKRETARIAT	8.244.632.237,00	1.462.250.115,00	17,74	
2	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH	321.406.825,00	21.505.000,00	6,69	
3	BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH	340.286.900,00	36.621.500,00	10,76	
4	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PELAPORAN	380.884.400,00	21.908.806,00	5,75	

Pencapaian Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW 1	% CAPAIAN
	Kategori predikat hasil evaluasi AKIP Bapenda	A	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	64.256.981.438,00	9.417.163.443,94	14,66

Sumbawa Besar, 31 Maret 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa



AGUS MUSTAMIN S.Sos. M.Si
NIP.19700823 199201 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Hasanuddin Nomor 1 Telp. (0371) 2620786 Sumbawa Besar

LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TRIWULAN II TAHUN 2023

Kegiatan Monev Triwulan II dilakukan dengan cara menyampaikan formulir atau format yang harus diisi oleh bidang - bidang untuk kemudian dikompilasi dalam bentuk laporan kinerja triwulanan, Laporan fisik keuangan dan matrik rencana kerja dan capaian kinerja

Adapun pelaksanaan pengumpulan dan kompilasi data perkembangan kinerja keuangan dan pemantauan capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada Triwulan I dilaksanakan pada Minggu ke II dan Minggu ke III

Ringkasan hasil Kompilasi data terkait perkembangan capaian kinerja program dan kegiatan serta kinerja keuangan baik dari sisi pendapatan maupun belanja adalah sebagai berikut :

Penerimaan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 per 30 Juni 2023

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	(%)
A	PENDAPATAN DAERAH	158.419.146.523,00	47.491.203.944,94	29,98
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.256.981.438,00	18.032.847.527,94	28,06
1	Pendapatan Pajak Daerah	42.389.125.000,00	17.405.717.030,00	41,06
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.342.856.438,00	-	0,00
4	Lain-lain Pendapatn Asli Daerah yang Sah	9.525.000.000,00	627.130.497,94	6,58
2	PENDAPATAN TRANSFER	94.162.165.085,00	29.458.356.417,00	31,28
2	Pendapatan Transfer antar Daerah	94.162.165.085,00	29.458.356.417,00	31,28

Progres Laporan Fiskeu Program dan Kegiatan dari masing - masing bidang dan Sekretariat
per 30 Juni 2023

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		KET
			KEUANGAN		
			Rp.	%	
1	SEKRETARIAT	8.244.632.237,00	3.580.544.621,00	43,43	
2	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH	321.406.825,00	66.501.000,00	20,69	
3	BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH	340.286.900,00	106.322.000,00	31,24	
4	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PELAPORAN	380.884.400,00	39.815.306,00	10,45	

Pencapaian Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW 1	% CAPAIAN
	Kategori predikat hasil evaluasi AKIP Bapenda	A	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	64.256.981.438,00	18.032.847.527,94	28,06

Sumbawa Besar, 30 Juni 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa



AGUS MUSTAMIN S/Sos. M Si
NIP.19700823 199201 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Hasanuddin Nomor 1 Telp. (0371) 2620786 Sumbawa Besar

LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TRIWULAN III TAHUN 2023

Kegiatan Moneyv Triwulan III dilakukan dengan cara menyampalakan formulir atau format yang harus di isi oleh bidang - bidang untuk kemudian dikompilasi dalam bentuk laporan kinerja triwulanan, Laporan fisik keuangan dan matrik rencana kerja dan capaian kinerja

Adapun pelaksanaan pengumpulan dan kompilasi data perkembangan kinerja keuangan dan pemantauan capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada Triwulan I dilaksanakan pada Minggu ke III dan Minggu ke IV

Ringkasan hasil Kompilasi data terkait perkembangan capaian kinerja program dan kegiatan serta kinerja keuangan baik dari sisi pendapatan maupun belanja adalah sebagai berikut :

Penerimaan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 per 30 September 2023

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	(%)
A	PENDAPATAN DAERAH	178.974.910.463,00	88.180.258.999,68	49,27
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	83.964.778.378,00	44.497.945.041,68	53,00
1	Pendapatan Pajak Daerah	62.096.921.940,00	30.476.790.784,54	49,08
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.342.856.438,00	13.169.599.377,00	106,70
4	Lain-lain Pendapatn Asli Daerah yang Sah	9.525.000.000,00	851.554.880,14	8,94
2	PENDAPATAN TRANSFER	95.010.132.085,00	43.682.313.958,00	45,98
2	Pendapatan Transfer antar Daerah	95.010.132.085,00	43.682.313.958,00	45,98

Progres Laporan Fiskeu Program dan Kegiatan dari masing - masing bidang dan Sekretariat
per 30 September 2023

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		KET
			KEUANGAN		
			Rp.	%	
1	SEKRETARIAT	8.369.632.999,00	5.447.016.343,00	65,08	
2	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH	327.931.825,00	172.139.000,00	52,49	
3	BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH	346.811.900,00	192.686.500,00	55,56	
4	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PELAPORAN	383.884.400,00	161.029.433,00	41,95	

Pencapaian Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Triwulan III Tahun 2023

N0	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW 1	% CAPAIAN
	Kategori predikat hasil evaluasi AKIP Bapenda	A	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	83.964.778.378,00	44.497.945.041,68	53,00

Sumbawa Besar, 30 September 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa



AGUS MUSTAMIN, S.Sos., M.Si
NIP.19700623 199201 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jln. Hasanuddin Nomor 1 Telp. (0371) 2620786 Sumbawa Besar

LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TRIWULAN IV TAHUN 2023

Kegiatan Monev Triwulan VI dilakukan dengan cara menyampaikan formulir atau format yang harus di isi oleh bidang - bidang untuk kemudian dikompilasi dalam bentuk laporan kinerja triwulanan, Laporan fisik keuangan dan matrik rencana kerja dan capaian kinerja

Adapun pelaksanaan pengumpulan dan kompilasi data perkembangan kinerja keuangan dan pemantauan capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada Triwulan I dilaksanakan pada Minggu ke IV

Ringkasan hasil Kompilasi data terkait perkembangan capaian kinerja program dan kegiatan serta kinerja keuangan baik dari sisi pendapatan maupun belanja adalah sebagai berikut :

Penerimaan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 per 28 Desember 2023

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	(%)
A	PENDAPATAN DAERAH	197.436.450.878,00	147.979.798.060,97	74,95
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.426.318.793,00	65.415.272.330,97	63,87
1	Pendapatan Pajak Daerah	78.074.934.520,00	47.339.956.470,54	60,63
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.826.384.273,00	14.826.384.273,00	100,00
4	Lain-lain Pendapatn Asli Daerah yang Sah	9.525.000.000,00	3.248.931.587,43	34,11
2	PENDAPATAN TRANSFER	95.010.132.085,00	82.564.525.730,00	86,90
2	Pendapatan Transfer antar Daerah	95.010.132.085,00	82.564.525.730,00	86,90

Progres Laporan Fiskeu Program dan Kegiatan dari masing - masing bidang dan Sekretariat
per 30 Desember 2023

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		KET
			KEUANGAN		
			Rp.	%	
1	SEKRETARIAT	8.608.476.220,00	7.586.334.060,00	88,13	
2	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH	378.017.825,00	374.130.000,00	98,97	
3	BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH	366.918.900,00	361.400.500,00	98,53	
4	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PELAPORAN	562.373.800,00	540.537.473,00	96,65	

Perwakilan IV Tahun 2023

SI KINERJA

SI TW 1	
CAPAIAN	
%	
-	
79,87	

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Hasanuddin Nomor 1 Telp. (0371) 2620786 Sumbawa Besar

LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TRIWULAN IV TAHUN 2023

Kegiatan Monev Triwulan VI dilakukan dengan cara menyampaikan formulir atau format yang harus diisi oleh bidang - bidang untuk kemudian dikompilasi dalam bentuk laporan kinerja triwulanan, Laporan fisik keuangan dan matrik rencana kerja dan capaian kinerja

Adapun pelaksanaan pengumpulan dan kompilasi data perkembangan kinerja keuangan dan pemantauan capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada Triwulan I dilaksanakan pada Minggu ke IV

Ringkasan hasil Kompilasi data terkait perkembangan capaian kinerja program dan kegiatan serta kinerja keuangan baik dari sisi pendapatan maupun belanja adalah sebagai berikut :

Penerimaan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 per 28 Desember 2023

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	(%)
A	PENDAPATAN DAERAH	197.436.450.878,00	147.979.798.060,97	74,95
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.426.318.793,00	65.415.272.330,97	63,87
1	Pendapatan Pajak Daerah	78.074.934.520,00	47.339.956.470,54	60,63
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.826.384.273,00	14.826.384.273,00	100,00
4	Lain-lain Pendapatn Asli Daerah yang Sah	9.525.000.000,00	3.248.931.587,43	34,11
2	PENDAPATAN TRANSFER	95.010.132.085,00	82.564.525.730,00	86,90
2	Pendapatan Transfer antar Daerah	95.010.132.085,00	82.564.525.730,00	86,90

Progres Laporan Fiskeu Program dan Kegiatan dari masing - masing bidang dan Sekretariat
per 30 Desember 2023

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		KET
			KEUANGAN		
			Rp.	%	
1	SEKRETARIAT	8.608.476.220,00	7.586.334.060,00	88,13	
2	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH	378.017.825,00	374.130.000,00	98,97	
3	BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH	366.918.900,00	361.430.500,00	98,53	
4	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PELAPORAN	562.373.800,00	540.537.473,00	96,65	

Pencapaian Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Triwulan IV Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW 1	% CAPAIAN
	Kategori predikat hasil evaluasi AKIP Bapenda	A	B	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	102.426.318.793,00	65.415.272.330,97	63,87

Sumbawa Besar, 30 Desember 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa

 **AGUS MUSTAMIN S.Sos, M.Si**
NIP.19700823 199201 1 001